



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PENDIDIKAN
KOTA TARAKAN
2025



PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No. 1 Telp. (0551) 21072-21859, Tarakan 77121

Laman : <http://inspektorat.tarakankota.go.id> Pos-el : inspektorat@tarakankota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

OLEH TIM REVIU KINERJA INSPEKTORAT KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2026

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami terhadap Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi dalam Laporan Kinerja yang disajikan Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

Tarakan, 27 Februari 2026

Inspektur,

Abd. Azis Hasan, A.P., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750212 199501 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKIP ini merupakan implementasi dari amanat peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

LKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan kepada Wali Kota Tarakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta seluruh pemangku kepentingan atas pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan sektor pendidikan di Kota Tarakan tahun 2025. Penyajian informasi kinerja yang akurat, terukur, dan komprehensif dalam dokumen ini diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi strategis serta dasar pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Substansi LKIP Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025 disusun secara sistematis dalam empat bab :

BAB I Pendahuluan. Berisi penjelasan umum instansi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja. Berisi ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

1. Capaian Kinerja Organisasi, Informasi yang disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi.
2. Realisasi Anggaran, informasi yang disajikan uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup. Berisi uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Pencapaian kinerja yang tertuang dalam LKIP ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan sinergi dari seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Tarakan, dukungan Pemerintah Kota Tarakan, koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal terkait, serta partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder pendidikan. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kontribusi yang telah diberikan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP ini masih terdapat ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga LKIP ini dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan pendidikan yang berkualitas di Kota Tarakan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarakan, 26 Januari 2026
KEPALA DINAS *d*
TAMRIN TOHA, S.T.M.Sc
NIP.196901212007011022

IKTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 menandai periode inaugural dalam implementasi RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029, sebagai tahun pertama pelaksanaan roadmap strategis organisasi. Berdasarkan RENSTRA tersebut, kerangka kinerja Dinas Pendidikan difokuskan pada pencapaian 1 (satu) sasaran strategis, dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029, yang menjadi fondasi penting dalam pencapaian visi dan misi pembangunan pendidikan jangka menengah. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 295.632.971.811 dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan tahun 2025 adalah sebesar Rp.277.912.528.847.00, yang di optimalkan untuk mewujudkan sasaran strategis pembangunan sektor pendidikan di Kota Tarakan.

Berdasarkan dinamika capaian kinerja tersebut, Dinas Pendidikan Kota Tarakan melaksanakan evaluasi komprehensif dan sistematis terhadap seluruh program, kegiatan, serta output yang telah diimplementasikan sepanjang tahun 2025. Evaluasi ini dilakukan dengan tetap berpedoman pada kerangka sasaran strategis dan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029, sebagai landasan fundamental dalam upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas kinerja organisasi secara berkesinambungan.

Proses evaluasi yang dilakukan tidak hanya mengidentifikasi capaian dan kesenjangan kinerja, namun juga menganalisis secara mendalam faktor-faktor pendukung keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui pendekatan evaluatif yang terstruktur dan berbasis data, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis yang konkret dan aplikatif untuk memperkuat ekosistem pendidikan di Kota Tarakan.

Hasil evaluasi ini diposisikan sebagai referensi strategis dan instrumen pengambilan keputusan yang efektif dalam mendorong continuous improvement, akselerasi implementasi kebijakan, serta optimalisasi alokasi sumber daya organisasi. Lebih dari itu, evaluasi kinerja ini menjadi bagian integral dari komitmen Dinas Pendidikan dalam berkontribusi terhadap transformasi pembangunan Kota Tarakan, khususnya dalam mewujudkan

ekosistem pendidikan yang unggul, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan untuk generasi masa depan yang lebih baik.

Tim Penyusun LKIP
Dinas Pendidikan Tahun 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum	2
Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
Sumber Daya Aparatur.....	5
Isu Strategis	7
BAB II.....	9
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Visi dan Misi	9
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
2.3 Landasan Penetapan Tujuan dan Sasaran.....	12
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	12
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
Perjanjian Kinerja dan Strategi Pencapaian Sasaran	16
BAB III.....	18
AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	18
3.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja	19
3.3 Substansi dan Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja	20
3.4 Pelaporan Kinerja Tahun 2025	20
3.5 Analisis Pencapaian Kinerja.....	21
3.6 Kategori Pengukuran Kinerja	22
3.7 Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.8 Sasaran Kinerja Tahun Anggaran 2025	24
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis	80
Program Pendukung Dinas Pendidikan	80
Tahun 2025.....	80
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025.....	84
KESIMPULAN.....	125
Kesimpulan.....	125
Rekomendasi	126

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. Keenam komponen ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang komprehensif dan terukur.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya (good governance and clean government). Melalui implementasi SAKIP, diharapkan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada publik, sehingga tercipta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban kinerja.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional melalui keterbukaan informasi kinerja pemerintah.

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Dinas Pendidikan Kota Tarakan selaku unsur pembantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja. Dalam rangka menyelenggarakan SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan, Dinas Pendidikan Kota Tarakan telah menyusun dan menetapkan beberapa dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Rencana Strategis periode 5 (lima) tahun berupa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam pencapaian kinerja organisasi; (2) Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis dan memuat program, kegiatan, serta indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun berjalan; dan (3) Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025 yang memuat target kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi sebagai komitmen bersama antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil.

Melalui implementasi SAKIP yang konsisten, Dinas Pendidikan Kota Tarakan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepuasan stakeholder.

Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Penyusunan LAKIP ini merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil (outcome), serta disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LAKIP digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan.

Penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

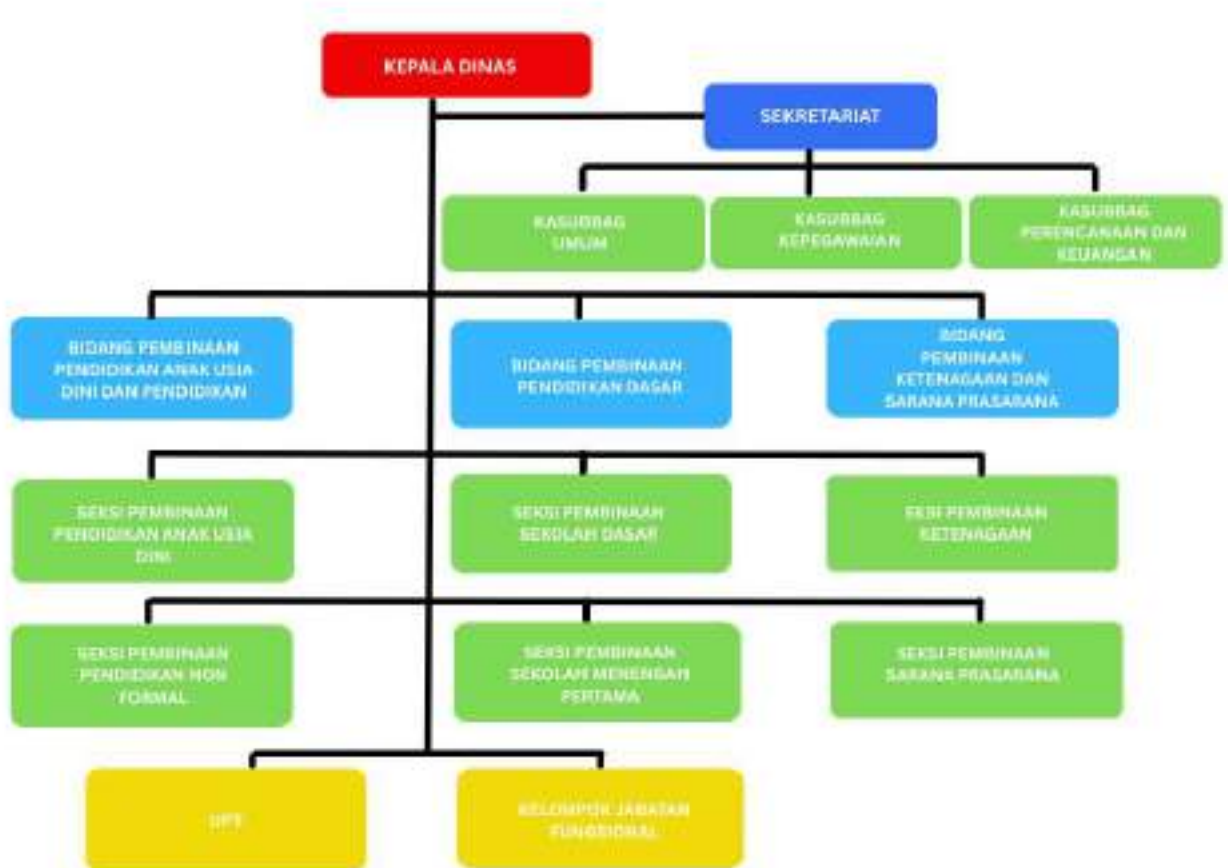
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Pendidikan Kota Tarakan memiliki Fungsi adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan non formal, pendidikan dasar, serta pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan non formal, pendidikan dasar, serta pembinaan ketenagaan dan sarana
- c. prasarana yang menjadi kewenangan Daerah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan non formal, pendidikan dasar, serta pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah.
- d. pelaksanaan administrasi dinas
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tarakan



Sumber Daya Aparatur

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai kebijakan pembangunan sektor pendidikan bagi Pemerintah Daerah, maka kualitas dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor krusial dan determinan dalam penyelenggaraan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. SDM aparatur yang berkompeten tidak hanya berperan dalam aspek teknis operasional, namun juga dalam dimensi strategis perencanaan, koordinasi, supervisi, hingga inovasi program pendidikan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Komposisi dan kualifikasi sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pendidikan mencerminkan kapasitas organisasi dalam menjalankan mandatnya. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan karier menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Distribusi SDM yang proporsional sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan, maupun kompetensi, akan sangat mempengaruhi efektivitas pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan.

Kondisi eksisting sumber daya aparatur Pemerintah yang bertugas di Dinas Pendidikan Kota Tarakan dapat dilihat secara komprehensif dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Dinas Pendidikan Kota Tarakan
Tahun 2025

Status Kepegawaian	Gol / Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan							Total
		Kepala Dinas	Bidang				UPT SKB	Pengawas / Penilik	
			Sekretariat	PAUD & Non Formal	Pendidikan Dasar	Ketenagaa n dan Sarpras			
A. Aparatur Sipil Negara									
Pembina Utama Madya	IVd								
Pembina Utama Muda	IV/c							5	5
Pembina Tk. I	IV/b	1					1	6	7
Pembina	IV/a		1		1		1	2	5
Penata Tk. I	III/d		5	1	3	4		4	17
Penata	III/c		4			1			5
Penata Muda Tk. I	III/b		2	2	2	2	1		9
Penata Muda	III/a		1	1	1	1	1		5
Pengatur Tk. I	II/d		1	1					2
Pengatur	II/c								
Pengatur Muda Tk. I	II/b		1						1
Pengatur Muda	II/a								
Juru Tk. I	I/d								
Juru	I/c								
Juru Muda Tk. I	I/b								
Juru Muda	I/a								
PPPK						6			6
Tenaga Kontrak			4						4
Jumlah		1	19	5	7	14	3	17	66

A. Sarana Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Tarakan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana dalam menunjang berbagai aktivitas pembangunan dalam bidang pendidikan, yaitu Tabel. 1. Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Tarakan

No	Sarana Kerja yang tersedia	Jumlah	Keterangan	
1	Tanah Kantor Pemerintah	1	Bidang	
2	Gedung Dinas Pendidikan	1	Gedung	Kondisi Baik
3	Tanah Sekolah	65	Lahan	Bersertifikat 54 Lahan Dokumen Lain 11 Lahan
4	Gedung Sekolah	66	Gedung	Permanen 34 Gedung SD, 14 Gedung SMP dan 4 Gedung PAUD Belum Permanen 11 Gedung SD Di Klaim Pihak lain 6 Gedung SD 1 SKB
5	Kendaraan Roda 6 (Bus Sekolah)	4	Unit	Disdik 4 Unit
6	Kendaraan Roda 4 (Inventaris)	5	Unit	Kepala Dinas Sekretaris Kabid Dikdas Kabid PKS Koordinator Pengawas
7	Kendaraan Roda 2	119	Unit	Disdik 27 Unit Sekolah 61 Unit Pengawas 21 Unit Tak Layak pakai 61 Unit

Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Tarakan merupakan permasalahan mendasar dan krusial yang memerlukan perhatian serius serta penanganan prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Tarakan. Isu-isu strategis ini diidentifikasi melalui proses analisis yang komprehensif terhadap kondisi eksisting pendidikan, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta kajian mendalam terhadap berbagai tantangan dan dinamika pembangunan pendidikan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Identifikasi isu strategis dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan, kepala sekolah, komite sekolah, orang tua siswa, serta masyarakat luas melalui mekanisme konsultasi publik dan forum-forum koordinasi. Proses identifikasi ini juga mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti aksesibilitas pendidikan, kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, ketersediaan dan kondisi sarana prasarana, serta tata kelola pendidikan yang akuntabel dan transparan.

Isu-isu strategis yang teridentifikasi menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, penetapan prioritas program dan kegiatan, serta alokasi sumber daya organisasi. Penanganan isu strategis dilakukan secara sistematis dan terencana melalui intervensi program yang tepat sasaran, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan memahami dan merespons isu-isu strategis secara tepat, diharapkan Dinas Pendidikan dapat mengambil langkah-langkah strategis yang efektif dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan PAUDNF dan pendidikan dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
3. Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan
4. Peningkatan dan pengembangan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Penataan sistem pengelolaan manajemen pendidikan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mencakup rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan hanya dapat disusun apabila ‘wujud’ Kota Tarakan yang ingin dicapai dalam rentang waktu tersebut telah dirumuskan dengan jelas. Wujud yang ingin dicapai tersebut harus benar-benar mampu menjawab permasalahan strategis masyarakat sehubungan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal baik dalam lingkup lokal maupun domestik dan global.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan. Visi ini akan menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan

“Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Berdasarkan dari visi yang telah dirumuskan dan dijelaskan sebelumnya, Kota Tarakan memiliki 5 (lima) misi pembangunan. Misi pembangunan ini adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah 2025-2029. Dalam misi (agenda) Pembangunan tersebut. Perumusan dan penjelasan misi RPJMD Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing berarti membangun masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kesehatan yang baik sehingga mereka mampu bersaing secara aktif dalam dunia kerja, usaha, maupun kehidupan sosial. Kota Tarakan sedang

berkembang menuju kota cerdas (*smart city*) dan pusat ekonomi berbasis jasa, perdagangan, kelautan, dan ekonomi kreatif. Semua sektor ini butuh SDM yang siap pakai, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi.

2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal.

Misi kedua ini mencerminkan upaya pemerintah Kota Tarakan untuk memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tapi merata hingga ke daerah pesisir, dan pulau-pulau kecil serta menyediakan infrastruktur dasar (seperti jalan, air bersih, listrik, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan) secara merata dan berkualitas untuk semua masyarakat.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha berkeadilan dan bertumpu pada sektor Jasa, perdagangan, Perikanan Kelautan, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kerakyatan (UMKM).

Misi ketiga ini menunjukkan arah strategis pembangunan ekonomi Kota Tarakan yang fokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara adil dan inklusif, dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berusaha, dan mengembangkan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar di wilayah Tarakan, serta memberdayakan pelaku ekonomi lokal, terutama UMKM dan masyarakat kecil agar ikut terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi daerah.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota.

Misi keempat ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang modern, terbuka, cepat tanggap, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat, dan menjaga kondisi kota yang aman, tertib, dan nyaman, sebagai fondasi penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga.

5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapibencana.

Misi kelima ini mencerminkan tekad Pemerintah Kota Tarakan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengelola sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, serta Meningkatkan kesiapsiagaan

masyarakat dan infrastruktur kota terhadap berbagai potensi bencana, baik bencana alam maupun non-alam

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Di dalam rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan, tujuan dan sasaran yang dicanangkan merupakan turunan langsung dari Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Keterkaitan yang erat ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Dinas Pendidikan dalam menyelaraskan seluruh program dan kegiatan pendidikan dengan visi dan misi pembangunan daerah secara menyeluruh dan komprehensif.

Penyusunan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dilakukan melalui proses kajian yang mendalam dan sistematis terhadap dokumen RPJMD 2025-2029. Proses ini mempertimbangkan berbagai aspek penting, antara lain kondisi riil pendidikan di Kota Tarakan saat ini, evaluasi komprehensif terhadap capaian kinerja periode 2019-2024, identifikasi berbagai tantangan dan permasalahan yang masih dihadapi, serta analisis terhadap peluang-peluang pengembangan dan inovasi pendidikan di masa mendatang.

Keselaran antara Renstra Dinas Pendidikan dengan RPJMD Kota Tarakan 2025-2029 merupakan hal yang sangat penting dan strategis untuk menjamin konsistensi arah kebijakan pembangunan pendidikan dengan kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan. Keselaran ini juga memberikan kemudahan dalam proses perencanaan dan penganggaran program-program pendidikan, meningkatkan efektivitas koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah. Lebih dari itu, sinkronisasi ini memastikan bahwa sektor pendidikan dapat memberikan kontribusi yang optimal dan signifikan terhadap pencapaian visi pembangunan Kota Tarakan sebagai kota yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Visi RPJMD	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Tujuan DISDIK	Sasaran RPJMD	Sasaran DISDIK
Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
					Meningkatnya kualitas satuan pendidikan
					Meratanya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

2.3 Landasan Penetapan Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan MISI, TUJUAN dan SASARAN RPJMD PEMERINTAH KOTA TARAKAN Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, maka Dinas Pendidikan Kota Tarakan menetapkan tujuan dan sasaran RENSTRA sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan RENSTRA

2.4 Indikator Kinerja Utama

Penetapan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode lima tahunan 2025-2029 merupakan penjabaran yang komprehensif dari visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan yang telah dirumuskan secara spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata. Sasaran strategis ini dirancang dengan

mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan pendidikan, mulai dari peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran, penguatan tata kelola pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia pendidikan yang profesional dan kompeten.

Setiap sasaran strategis yang ditetapkan memiliki keterkaitan erat dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan secara keseluruhan. Hasil yang dicapai dari implementasi sasaran-sasaran strategis ini merupakan ukuran konkret tingkat keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian sasaran strategis ini juga menjadi indikator penting dalam menilai kontribusi sektor pendidikan terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan sasaran strategis dapat diukur dan dievaluasi secara objektif, setiap sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif yang dapat dipantau perkembangannya secara berkala melalui sistem pelaporan rutin, survei, maupun evaluasi periodik sepanjang periode pelaksanaan Renstra.

Oleh karena itu, rumusan sasaran strategis yang akan dicapai telah diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang mengacu pada RPJMD Kota Tarakan 2025-2029 serta standar kinerja nasional di bidang pendidikan. Indikator Kinerja Utama ini disusun melalui proses yang melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan, dengan mempertimbangkan baseline data tahun 2024, target pencapaian bertahap untuk setiap tahun, serta target akhir yang diharapkan tercapai pada tahun 2029.

Penetapan sasaran strategis dan IKU ini memperhatikan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga setiap sasaran memiliki kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diwujudkan melalui program dan kegiatan yang terencana. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Tarakan berdasarkan RPJMD dan kebutuhan spesifik sektor pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025– 2029
Rpjmd Kota Tarakan Bidang Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1	Angka Harapan Lama Sekolah	$EYLS = EK \times \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ <p>dimana: EYLS = Angka harapan lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas EK = Angka penduduk usia yang bersekolah pada tahun t x = Lama sekolah penduduk ke-i yang bersekolah pada tahun t n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Statistik	Statistik
	2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana: RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x = Lama sekolah penduduk ke-i yang bersekolah 25 tahun n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Statistik	Statistik

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2029
Dinas Pendidikan Kota Tarakan

Sasaran Strategis	N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Partisipasi Pendidikan	1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan Kesetaraan 7-18 Tahun	APS mengukur partisipasi sekolah secara umum tanpa membedakan jenjang pendidikan formal (SD, SMP, SMA) atau non-formal (Pendidikan Kesetaraan). Fokusnya adalah pada partisipasi pendidikan secara keseluruhan dalam rentang usia yang ditetapkan APS $\text{Pendidikan Kesetaraan}(7-18) = \frac{\text{Jumlah total penduduk usia 7-18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang bersekolah di Pendidikan Kesetaraan}} \times 100\%$	DAPODIK /DISDUKCAPIL	DIKDASMENPENDIDIKAN NON FORMAL
	2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 5-6 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5-6 tahun memiliki formulasi yang lebih spesifik. Ini mengukur proporsi anak usia 5-6 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan apapun, baik PAUD maupun jenjang formal lainnya $\text{APS PAUD}(5-6) = \frac{\text{Jumlah total penduduk usia 5-6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang bersekolah}} \times 100\%$	DAPODIK /DISDUKCAPIL	PAUDNF

	3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Usia 7-15 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk pendidikan dasar usia 7-15 tahun dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk dalam kelompok usia tersebut yang sedang bersekolah, dengan total penduduk dalam kelompok usia yang sama. APS adalah salah satu indikator utama untuk mengukur akses pendidikan dan day APS 7-15 = $\frac{\text{Jumlah total penduduk usia 7-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang bersekolah}} \times 100\%$	DAPODIK/ DISDUKCAPIL	DIKDASMEN
Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan	4	Persentase Rata-Rata Capaian Kemampuan Literasi	Persentase Rata-Rata Capaian Kemampuan Literasi adalah ukuran tingkat penguasaan peserta didik terhadap kemampuan literasi dasar (membaca dan memahami teks) yang diperoleh melalui hasil asesmen nasional, asesmen daerah, atau instrumen literasi lainnya Persentase Capaian Literasi (%) = $\frac{\text{Jumlah Seluruh Peserta Didik yang Diukur}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mencapai Kompetensi Minimal Literasi}} \times 100$	RAPORT PENDIDIKAN	DIKDASMEN
	5	Persentase Rata-Rata Capaian Kemampuan Numerasi	Persentase Rata-Rata Capaian Kemampuan Numerasi adalah ukuran tingkat penguasaan peserta didik terhadap kemampuan numerasi dasar (kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari) berdasarkan hasil asesmen nasional Persentase Capaian Numerasi (%) = $\frac{\text{Jumlah Seluruh Peserta Didik yang Diukur}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mencapai Kompetensi Minimal Numerasi}} \times 100$	RAPORT PENDIDIKAN	DIKDASMEN
	6	Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B adalah ukuran yang menunjukkan persentase satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan) yang telah memperoleh peringkat akreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) atau Badan Akreditasi Nasional Pendidik Proporsi Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B (%) = $\frac{\text{Jumlah Seluruh Satuan Pendidikan yang Telah Diakreditasi}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B}} \times 1$	DAPODIK	DIKDASMEN
	7	Persentase Rata-Rata Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas	Indeks iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas adalah ukuran lingkungan yang mendukung, menghargai, dan merayakan keberagaman, serta menciptakan rasa aman bagi peserta didik Persentase Rata-Rata Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	RAPORT PENDIDIKAN	DIKDASMEN

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dan Strategi Pencapaian Sasaran

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Dokumen-dokumen acuan tersebut meliputi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman jangka menengah, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Tahun 2025 sebagai penjabaran tahunan dari Renstra, pelaksanaan anggaran. Keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki landasan yang kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. (Dokumen Perjanjian Kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran)

Strategi Pencapaian Sasaran Periode 2025-2029

Untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang terdiri atas 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tarakan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperlukan strategi yang komprehensif, sistematis, dan terukur. Strategi ini akan diimplementasikan melalui 5 (lima) program program prioritas dan 1 (satu) program pendukung

Lima program prioritas tersebut dirancang untuk secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, perluasan akses pendidikan yang berkeadilan, penguatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sementara itu, program pendukung difokuskan pada penguatan manajemen internal, peningkatan sistem pelaporan dan akuntabilitas, serta pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan.

Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan yang lebih spesifik dan operasional, dengan masing-masing kegiatan memiliki target output yang jelas, timeline pelaksanaan yang terukur, dan penanggung jawab yang bertanggung jawab penuh atas pencapaian hasil. Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sinergi antar kegiatan, serta dampak yang diharapkan terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran.

Untuk mendukung pelaksanaan seluruh program prioritas, program pendukung, dan kegiatan-kegiatan tersebut, telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 295.632.971.811 dua ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah) untuk periode tahun 2025 Alokasi anggaran ini telah diperhitungkan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, prioritas pembangunan pendidikan

Besaran anggaran tersebut akan didistribusikan secara proporsional untuk masing-masing program dan kegiatan berdasarkan tingkat urgensi, cakupan sasaran, dan besaran dampak yang diharapkan. Mekanisme penganggaran juga mempertimbangkan fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika kebutuhan dan prioritas yang berkembang selama periode pelaksanaan, namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata kelola keuangan yang baik.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik dan sistematis. Akuntabilitas kinerja ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan berorientasi pada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Secara lebih spesifik, akuntabilitas kinerja dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusan dari perorangan atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi, menerima pelaporan akuntabilitas sebagai pemberi amanah. Dalam konteks ini, transparansi dan kejujuran dalam melaporkan capaian kinerja menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi, tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Dinas Pendidikan Kota Tarakan selaku pengemban amanah dari masyarakat dan Pemerintah Kota Tarakan, memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang dibuat sesuai dengan ketentuan dan standar yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan LAKIP merupakan wujud komitmen Dinas Pendidikan dalam mewujudkan akuntabilitas publik dan memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja pembangunan pendidikan di Kota Tarakan.

3.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Peraturan ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh instansi pemerintah di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan ini memberikan pedoman teknis yang lebih rinci dan operasional mengenai tata cara penyusunan perjanjian kinerja sebagai dokumen komitmen awal, mekanisme pelaporan kinerja yang harus dilakukan secara berkala, serta prosedur reviu atau penelaahan atas laporan kinerja yang telah disusun untuk memastikan kualitas, akurasi, dan reliabilitas informasi yang disajikan. Petunjuk teknis ini memastikan adanya keseragaman format dan standar pelaporan di seluruh instansi pemerintah.

3. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan

Peraturan ini merupakan turunan dan penyesuaian dari peraturan tingkat nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik Pemerintah Kota Tarakan. Peraturan Wali Kota ini memberikan panduan yang lebih kontekstual bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dalam menyusun perjanjian

kinerja dan laporan kinerja yang selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

3.3 Substansi dan Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus memberikan gambaran yang komprehensif, objektif, dan terukur mengenai penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2025-2029 maupun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Laporan ini harus mampu menjelaskan secara detail mengenai sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pencapaian, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Sesuai dengan ketentuan dan prinsip tersebut, pengukuran kinerja digunakan sebagai instrumen untuk menilai secara objektif tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Pengukuran kinerja ini tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif semata, namun juga mempertimbangkan aspek kualitatif dari setiap output dan outcome yang dihasilkan, sehingga penilaian kinerja menjadi lebih holistik dan mencerminkan substansi pencapaian yang sebenarnya.

3.4 Pelaporan Kinerja Tahun 2025

Pelaporan kinerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025 disajikan melalui mekanisme pengukuran kinerja yang sistematis atas perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dan disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja ini merupakan kontrak kinerja antara pimpinan Dinas Pendidikan dengan atasan langsungnya, yang memuat komitmen untuk mencapai target-target kinerja tertentu dalam periode satu tahun anggaran sebagai tahun pertama implementasi Renstra 2025-2029.

Dalam bab ini akan disajikan uraian yang komprehensif dan mendalam mengenai berbagai aspek penting dalam akuntabilitas kinerja, yang meliputi: metodologi pengukuran kinerja yang digunakan, analisis mendalam terhadap hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi, analisis efisiensi penggunaan anggaran yang mengukur rasio antara input (anggaran) dengan output yang dihasilkan, serta penghargaan atau apresiasi yang telah diterima oleh Dinas Pendidikan sebagai bentuk pengakuan atas prestasi dan kinerja yang telah dicapai selama tahun 2025.

3.5 Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja merupakan bagian krusial dalam laporan akuntabilitas yang menjelaskan secara detail mengenai metode dan formula yang digunakan untuk menghitung tingkat capaian kinerja, membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun, serta membandingkan capaian tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya (baseline tahun 2024) untuk melihat tren perkembangan kinerja dan mengevaluasi efektivitas implementasi strategi baru dalam Renstra 2025-2029.

Selanjutnya, analisis ini juga menjelaskan secara rinci mengenai program-program strategis yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian setiap sasaran yang ditetapkan, beserta realisasi penggunaan anggaran untuk masing-masing sasaran strategis. Hal ini penting untuk menilai apakah alokasi anggaran yang diberikan telah digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian target kinerja, khususnya dalam tahun pertama periode Renstra baru.

Lebih lanjut, analisis pencapaian kinerja juga mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pencapaian sasaran, baik faktor pendukung yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan, maupun faktor penghambat yang perlu diantisipasi dan dimitigasi di masa mendatang. Analisis ini juga mencakup prestasi-prestasi atau pencapaian-pencapaian khusus yang terkait langsung dengan sasaran atau indikator kinerja tertentu, yang dapat dijadikan sebagai best

practice atau pembelajaran berharga bagi pengembangan kinerja di periode berikutnya, terutama untuk tahun-tahun selanjutnya dalam periode 2025-2029.

3.6 Kategori Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana target yang telah ditetapkan di awal periode, kemudian hasil perbandingan tersebut dikelompokkan dalam kategori nilai dan predikat kinerja yang telah ditetapkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pencapaian kinerja. Kategorisasi ini memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan terkait upaya-upaya perbaikan yang diperlukan untuk tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025-2029, serta memberikan informasi yang mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan mengenai posisi capaian kinerja Dinas Pendidikan di tahun pertama implementasi Renstra baru. Kategori pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	$90 \geq 100$	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

3.7 Capaian Kinerja Organisasi

Berikut akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi melalui analisis capaian kinerja yang komprehensif dan mendalam. Penyajian capaian kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan terukur mengenai sejauh mana Dinas Pendidikan Kota Tarakan telah berhasil mewujudkan komitmen yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta untuk mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan di masa mendatang.

Secara umum, semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tarakan pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan yang memuaskan, sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, serta sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Pendidikan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan di Kota Tarakan. Dukungan penuh dari Pemerintah Kota Tarakan, baik dalam bentuk komitmen anggaran yang memadai, kebijakan yang kondusif, maupun supervisi dan pembinaan yang berkelanjutan, juga menjadi faktor penting yang mendorong tercapainya kinerja yang optimal.

Meskipun secara umum capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun tetap terdapat beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan. Kendala-kendala tersebut antara lain meliputi perubahan kondisi eksternal yang tidak terprediksi sebelumnya, keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi spesifik tertentu, hambatan teknis di lapangan, serta dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Namun demikian, berbagai kendala tersebut telah dapat diantisipasi dan dimitigasi dengan baik melalui fleksibilitas dalam implementasi, penyesuaian strategi pelaksanaan, serta inovasi-inovasi yang dilakukan oleh tim pelaksana di lapangan.

3.8 Sasaran Kinerja Tahun Anggaran 2025

Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan di Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Strategis periode 2025-2029, yang dirancang untuk menjadi fondasi yang kuat bagi pencapaian target-target jangka menengah di tahun-tahun berikutnya. Sasaran-sasaran ini telah diformulasikan dengan cermat melalui proses perencanaan yang matang, dengan mempertimbangkan baseline kinerja tahun 2024, analisis kebutuhan riil di lapangan, proyeksi perkembangan kondisi pendidikan, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang pencapaiannya dapat diukur secara objektif dan akuntabel. Target yang ditetapkan untuk masing-masing indikator merupakan hasil perhitungan yang realistis namun tetap menantang (*stretching*), dengan mempertimbangkan kapasitas organisasi, ketersediaan sumber daya, serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai sasaran kinerja beserta indikator, target, dan realisasi pencapaiannya, maka Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan di Tahun Anggaran 2025 diuraikan secara lengkap pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Persentase Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	1	APS pendidikan Kesetaraan 7-18 Tahun	26.81%	37.51%	139.91%
		2	APS PAUD Usia 5-6 Tahun	69.04%	78.37%	113.51%
		3	APS Pendidikan Dasar Usia 7-15 Tahun	97.99%	98.00%	100.01%
2	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan	4	Persentase Rata-Rata Capaian Kemampuan Literasi	73,58%	71.58%	97.28%
		5	Persentase Rata-Rata Capaian Kemampuan Numerasi	61.35%	59.15%	96.41%

		6	Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Minimal B Terakreditasi	69.13%	76.90%	111.24%
		7	Persentase Rata-Rata Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas	69,12%	70.00%	101.27%
3	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan	8	Nilai SAKIP	82.67 (A)	74.35	89.94%
		9	Nilai IKM	85.14 (Indeks)	86.7	101,83

Tabel di atas menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis Dinas Pendidikan, secara umum capaian indikator menunjukkan kinerja yang baik dengan kecenderungan positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target optimal.

1. Sasaran: Meningkatnya Partisipasi Pendidikan

Capaian pada sasaran ini menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan seluruh indikator melampaui target yang telah ditetapkan.

- APS Pendidikan Kesetaraan Usia 7–18 Tahun mencapai 139,91%, yang mengindikasikan adanya peningkatan signifikan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal. Hal ini dapat dikaitkan dengan efektivitas program kesetaraan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan alternatif.
- APS PAUD Usia 5–6 Tahun mencapai 113,51%, menunjukkan keberhasilan dalam perluasan akses pendidikan usia dini.
- APS Pendidikan Dasar Usia 7–15 Tahun mencapai 100,01%, yang berarti hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah terlayani dalam sistem pendidikan formal.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan.

2. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan

Pada sasaran ini, capaian kinerja menunjukkan hasil yang relatif baik namun belum sepenuhnya optimal, khususnya pada indikator hasil belajar.

- Kemampuan Literasi mencapai 97,28% dan Kemampuan Numerasi sebesar 96,41%, yang menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi

pembelajaran berbasis kompetensi, peningkatan kapasitas guru, serta optimalisasi implementasi kurikulum.

- Proporsi Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B mencapai 111,24%, menunjukkan peningkatan mutu kelembagaan pendidikan secara signifikan.
- Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas sebesar 101,27% mencerminkan kondisi lingkungan belajar yang semakin kondusif, aman, dan inklusif.

Dengan demikian, meskipun aspek tata kelola dan lingkungan pendidikan telah menunjukkan capaian yang baik, peningkatan kualitas hasil belajar siswa masih menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

3. Sasaran: Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan

Capaian pada sasaran ini menunjukkan hasil yang bervariasi antara indikator kinerja internal dan eksternal.

- Nilai SAKIP mencapai 89,94% (kategori A dengan realisasi 74,35), yang menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja berbasis hasil (outcome).
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 101,83%, yang menunjukkan bahwa kualitas layanan publik yang diberikan telah melampaui ekspektasi masyarakat.

Tabel 3.3
Predikat Nilai Capaian Kinerja Program Prioritas
Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi	8
2	76 s/d <90	Tinggi	1
3	66 s/d <75	Sedang	-
4	51 s/d <65	Rendah	-
5	0 s/d <50	Sangat Rendah	-
Total Indikator			9

Tabel 3.4
Persentase Capaian Kinerja Sasaran
RPJMD Kota Tarakan Bidang Pendidikan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,41	14,23	98,75
		2	Rata-Rata Lama Sekolah	10,53	10,46	99,33

Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Pendidikan menjadi salah satu aspek fundamental dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Sebagai komponen penting dalam pembangunan manusia, pendidikan tidak hanya berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator kunci dalam menilai kesejahteraan dan kemajuan suatu wilayah. Dalam konteks pembangunan daerah, RPJMD Pemerintah Kota Tarakan menempatkan bidang pendidikan sebagai prioritas strategis yang diukur melalui pendekatan komprehensif menggunakan dua indikator utama, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah yang menggambarkan proyeksi lamanya pendidikan yang akan ditempuh oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang, serta Rata-rata Lama Sekolah yang mencerminkan capaian pendidikan aktual yang telah ditempuh. Kedua indikator ini secara bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh mengenai aksesibilitas, kualitas, dan pencapaian sistem pendidikan di Kota Tarakan, sekaligus menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pendidikan.

Tujuan RPJMD : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini merupakan salah satu

ukuran penting dalam menilai peluang dan akses pendidikan yang tersedia bagi generasi muda di suatu wilayah. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut anak-anak telah memasuki jenjang pendidikan formal. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Melalui indikator ini, dapat tergambar sejauh mana peluang anak-anak di Kota Tarakan untuk mengenyam pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga pendidikan tinggi, serta mencerminkan kemampuan sistem pendidikan dalam mengakomodasi kebutuhan pembelajaran masyarakat secara menyeluruh.

Sebagai instrumen evaluasi kebijakan pendidikan, HLS memberikan informasi strategis mengenai proyeksi pencapaian pendidikan yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program dan alokasi anggaran pendidikan ke depan. Nilai HLS yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan di daerah tersebut mampu memberikan kesempatan yang luas bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sekaligus mengindikasikan adanya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, keterjangkauan biaya pendidikan, serta dukungan sosial ekonomi yang kondusif bagi keberlanjutan proses pembelajaran.

Untuk menghitung Angka Harapan Lama Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025, digunakan metodologi perhitungan yang mengacu pada standar Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Formula →
$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t	Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
E_i^t	Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
P_i^t	Jumlah penduduk usia i pada tahun t
i	Usia ($a, a + 1, \dots, n$)
FK	Faktor koreksi pesantren

Tabel 3.5
Capaian Sasaran RPJMD
Meningkatnya Akses Akseibilitas Pendidikan
(2024-2029)

Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024 (%) Target	Tahun 2025		Capaian Kinerja tahun 2025 (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPJMD (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Angka Harapan Lama Sekolah	%	14,17	14,22	100,35	14,41	14,23	98,73	14,27	14,45

Data Bps Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa capaian kinerja RPJMD bidang pendidikan pada indikator angka harapan lama sekolah tahun 2025 mencapai 98,73% dengan kategori sangat tinggi (91%-100%). Artinya capaian tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian ini merupakan hasil dari sinergi berbagai pihak, termasuk komitmen pemerintah daerah dalam alokasi anggaran pendidikan, dedikasi tenaga pendidik, peningkatan sarana prasarana, serta partisipasi aktif masyarakat. Selanjutnya jika dilihat dengan target akhir RPJMD, maka telah tercapai 100%, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tarakan berhasil mencapai sasaran strategis bidang pendidikan sebelum masa RPJMD berakhir. Keberhasilan ini menjadi modal penting bagi Kota Tarakan dalam meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan

Tabel 3.6
Capaian Sasaran RPJMD
Meningkatnya Akses Akseibilitas Pendidikan
Kalimantan Utara Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Kaliamantan Utara Tahun 2024				
		Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	KTT
		Realisasi				
Angka Harapan Lama Sekolah	%	14,23	13,26	13,58	12,81	12,85

Sumber : BPS Kota Tarakan 2026

Meningkatnya Akses Akseibilitas Pendidikan di tahun 2025 dengan capaian angka harapan lama sekolah **14,23 tahun** lebih tinggi jika di bandingkan dengan Kabupaten/Kota Lain yang ada di Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 3.7
Capaian Sasaran RPJMD
Meningkatnya Akses Akseibilitas Pendidikan
Standar Nasional Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2025 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja tahun 2029(%)
		Target Kota Tarakan	Realisasi Kota Tarakan		Target Nasional	Realisasi Nasional	
Angka Harapan Lama Sekolah	%	14,23	14,23	100	13,30	NA	95,38

Sumber : BPS Kota Tarakan 2025

Jika dibandingkan dengan target dan capaian nasional pada tabel 3.7 di atas, maka target capaian **Sasaran 2 RPJMD** Meningkatnya Akses Akseibilitas Pendidikan di tahun 2025 dengan capaian angka harapan lama sekolah **14,23 tahun** lebih tinggi jika di banding dengan capaian Nasional **13,30 tahun** Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan dimaknai bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2025 memiliki peluang untuk bersekolah selama **25 tahun** atau setara dengan **Diploma 3**.

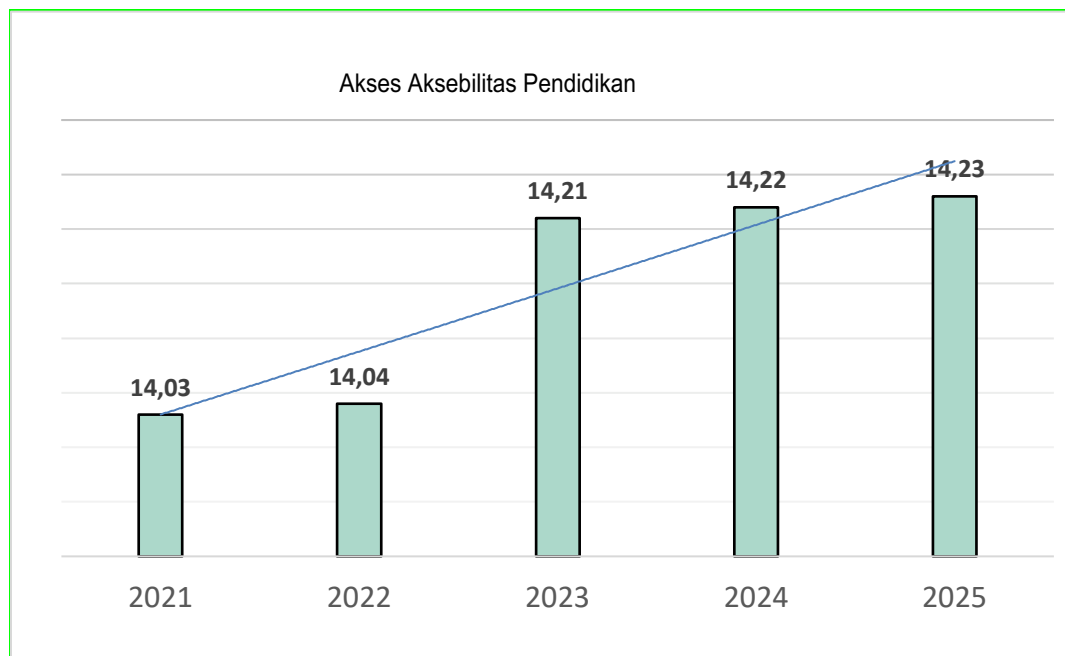
Berikut dapat dilihat melalui Tabel 3.8 dan Grafik 3.1 Capaian angka harapan lama sekolah selama 5 tahun terakhir sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.

Tabel 3.8
Capaian Sasaran
Meningkatnya Akses Akseibilitas Pendidikan
(2021-2025)

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
Angka Harapan Lama Sekolah	%	14,03	14,04	14,21	14,22	14,23

Sumber : BPS Kota Tarakan 2025

Grafik. 3.1
Capaian Angka Harapan Lama Sekolah
(2021-2025)



Sumber : RPJMD Pemerintah Kota Tarakan, Badan Pusat Statistik

Faktor Keberhasilan tercapainya kinerja Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan formal terhadap anak-anak usia sekolah.
2. Terpenuhinya Sarana Prasarana Kelas, Penambahan Ruang Kelas
3. Meningkatnya peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket

A,B dan C dan keaksaraan fungsional pada masyarakat dan membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di SKB.

4. Terselenggaranya literasi dalam upaya peningkatan budaya baca
5. Meningkatnya aktivitas peserta didik di bidang pendidikan.
6. Peningkatan anggaran pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar.
7. Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (8 standar).

Walaupun tingkat capaian Angka Harapan Lama Sekolah untuk Kota Tarakan sudah “Sangat Tinggi” tentu tetap ada Kendala/Hambatan yang terjadi dalam meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah tersebut, kendala dan hambatannya antara lain :

1. Angka kemiskinan meningkat, sehingga mempengaruhi angka harapan lama sekolah.
2. Koordinasi terhadap perangkat daerah terkait penduduk yang belum menamatkan sekolahnya belum maksimal.
3. Menurunnya minat anak usia sekolah dalam menempuh pendidikannya di pendidikan formal.

Sasaran Meningkatnya Akses Akseibilitas Pendidikan

Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dijadikan sebagai indikator komponen pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM). Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan Sasaran 2 RPJMD yaitu Meningkatnya Akses Akseibilitas Pendidikan dan merupakan indikator ke 2 dari Sasaran 2 RPJMD bidang Pendidikan.

Untuk menghitung Angka Rata-Rata Lama Sekolah menggunakan Rumus

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$$

dengan:

P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas

Lama sekolah penduduk ke-i =

- a. Tidak pernah sekolah = 0
- b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
- c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
- d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
- e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran 2 RPJMD bidang pendidikan dengan indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah, maka dapat dilihat dari matrik berikut ini

Tabel 3.9
Capaian Sasaran 2 RPJMD
Meningkatnya Akses Akseibilitas Pendidikan
(2024-2025)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja tahun 2025 (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RPJMD (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	9,99	10,37	103	10,38	10,46	100,77	10,42	10,34

Sumber : BPS Kota Tarakan, 2026

Berdasarkan tabel 3.9 dapat diketahui bahwa capaian kinerja RPJMD bidang pendidikan, yaitu angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2025 tercapai 100 % dengan kategori **sangat tinggi** (91%-100%) artinya bahwa realisasi rata-rata lama sekolah **10,46 tahun** memenuhi target, Dapat dilihat dengan perbandingan tahun sebelumnya yang telah mencapai 103 % (91 s/d < 100) dengan kategori **sangat tinggi**

Tabel 3.10
Capaian Sasaran 2 RPJMD
Meningkatnya Akses Akseibilitas Pendidikan
Kalimantan Utaran Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Kaliamantan Utara Tahun 2025				
		Tarakan	Bulungan	Malinau	Nunukan	KTT
		Realisasi				
Angka Rata-rata Lama Sekolah	%	10,46	9,42	9,64	8,40	9,41

Jika dibandingkan dengan target dan capaian nasional pada tabel 3.10 di atas, maka target capaian **Sasaran 2 RPJMD** Meningkatnya Akses

Akseibilitas Pendidikan di tahun 2025 dengan capaian angka rata-rata lama sekolah **10,46 tahun** lebih tinggi jika di bandingkan dengan Kabupaten/Kota Lain yang ada di Provinsi Kalimantan Utara (sumber dari BPS Kota Tarakan Tahun 2025)

Tabel 3.11
Capaian Sasaran 2 RPJMD
Meningkatnya Akses Akseibilitas Pendidikan
Standar Nasional Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Kota Tarakan tahun 2025(%)	Capaian Kinerja Nasional tahun 2025 (%)
Angka Harapan Lama Sekolah	%	10,46	9,07

Sumber : BPS Kota Tarakan 2026

Jika dibandingkan dengan target dan capaian nasional pada tabel 3.11 diatas, maka target capaian **Sasaran 2 RPJMD** Meningkatnya Akses Akseibilitas Pendidikan di tahun 2025 dengan capaian angka rata-rata lama sekolah **10,46 tahun** lebih tinggi jika di banding dengan capaian Nasional **9.07 tahun** (sumber dari BPS Kota Tarakan Tahun 2025).

Sehingga bisa di katakan bahwa angka rata-rata lama sekolah Kota Tarakan sudah sangat berkualitas, karena angka rata-rata lama sekolah digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal pada suatu daerah, tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Berikut dapat dilihat melalui Tabel 3.12 dan Grafik 3.2 Capaian angka rata-rata lama

sekolah selama 5 tahun terakhir sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.

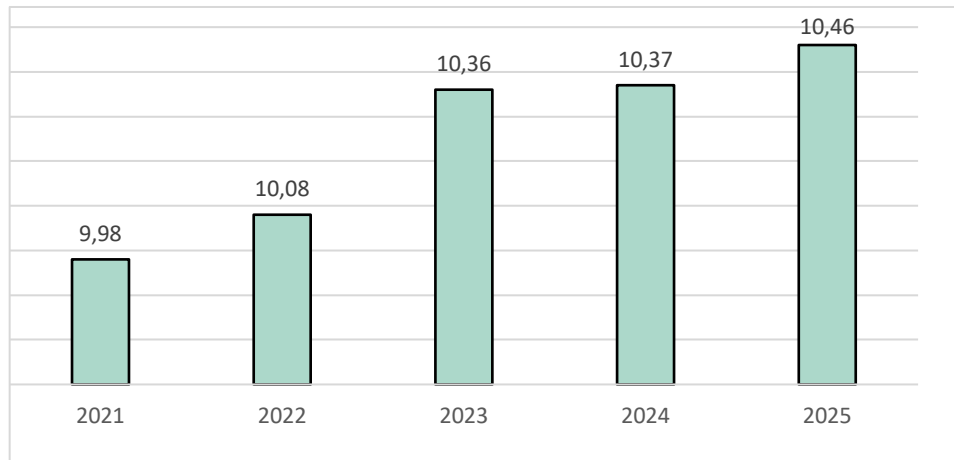
Tabel 3.12
Capaian Sasaran 2 RPJMD
Meningkatnya Akses Akseibilitas Pendidikan
(2021-2025)

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
Angka Rata-rata Lama Sekolah	%	9,98	10,08	10,36	10,37	10,46

Berdasarkan data realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2021–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, RLS tercatat sebesar 9,98 tahun dan meningkat menjadi 10,08 tahun pada 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 menjadi 10,36 tahun, kemudian relatif stabil pada 2024 sebesar 10,37 tahun, dan kembali meningkat pada 2025 menjadi 10,46 tahun.

Secara keseluruhan, terjadi kenaikan sebesar 0,48 tahun dalam kurun waktu lima tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan keberlanjutan pendidikan masyarakat, serta mengindikasikan efektivitas kebijakan dan program pendidikan dalam mendorong peningkatan partisipasi dan retensi peserta didik pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tren positif ini mencerminkan kemajuan bertahap dalam pembangunan sektor pendidikan

Grafik. 3.2
Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah
(2020-2025)



sumber : Badan Pusat Stat

Faktor Keberhasilan tercapainya kinerja Meningkatnya pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah antara lain :

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan
- Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Peningkatan kesejahteraan Masyarakat

Rata-Rata Lama Sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya waktu yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh pendidikan. Rata-Rata Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan, kualitas pendidikan, dan perencanaan kebijakan pendidikan.

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru
- Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan
- Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kendala / Hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah :

1. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor pembiayaan, faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak
2. Hubungan kerja sama dengan lintas sektoral untuk keterlaksanaan pendidikan kesetaraan belum optimal baik dalam pendataan maupun pelaksanaan pendidikan kesetaraan masih lemah.
3. Kurangnya motivasi dan minat belajar
4. Meningkatnya Akses Pendidikan

Tabel 3.13
Persentase Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Tahun 2022 sd 2025

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1 APS pendidikan Kesetaraan 7-18 Tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97,72	49,24	50,38	26,81	37,51	139
2 APS PAUD Usia 5-6 Tahun	67,65	45,16	66,76	68,15	47,29	69,39	68,85	58,92	85,58	69,04 %	78,37 %	113,51 %
3 APS Pendidikan Dasar Usia 7-15 Tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97,72	97,72	100	97,99	98,00,	100,01 %
4 Persentase Rata-Rata Capaian Kemampuan Literasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71,59	82,34	115	73,58	71,58	97,28
5 Persentase Rata-Rata Capaian Kemampuan Numerasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	59,15	72,21	122	61,35	59,15	96,41 %
6 Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	69,13 %	76,90 %	111,24 %
7 Persentase Rata-Rata	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	67,25	67,33	100,12	69,12	70,00	101,27 %

Capaian Iklim Keaman an, Kebhine kaan dan Inklusiv itas													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Sehingga semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah (APS) semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Selain sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga merupakan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan.

1. **APS 7-18 Tahun Kesetaraan**

Untuk menghitung Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun di tahun 2024, maka Dinas Pendidikan Kota Tarakan menggunakan rumus:

$$\text{APS Pendidikan Kesetaraan (7-18)} = \frac{\text{Jumlah total penduduk usia 7-18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang bersekolah di Pendidikan Kesetaraan}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, dapat dilihat berikut ini

Tabel 3.14
Capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah (7-18) Tahun Kesetaraan Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	2025			Target Akhir Renstra (2025) (%)	Capaian s/d Th. 2025 thd Target Renstra (%)
					Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Angka Partisipasi Sekolah (7-18) Tahun Kesetaraan	%	N/A	N/A	49,24	26,81	37,51	139	43,20	31,07

Sumber data : LKIP tahun 2021 s/d 2025

Berdasarkan data pada tabel, indikator **Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun pada pendidikan kesetaraan** menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik pada tahun 2025. Meskipun pada tahun 2022 dan 2023 data belum tersedia (N/A), capaian pada tahun 2024 telah menunjukkan angka sebesar **49,24%**, yang menjadi dasar penguatan intervensi program pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar **26,81%**, dengan realisasi mencapai **37,51%**, sehingga capaian kinerja mencapai **139%**. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan kesetaraan telah berjalan secara efektif dan mampu melampaui target yang telah direncanakan.

Capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal, khususnya bagi kelompok usia sekolah yang tidak terakomodasi dalam pendidikan formal. Program kesetaraan berperan strategis dalam memberikan kesempatan kedua (*second chance education*) bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara.

Selain itu, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar **43,20%**, realisasi tahun 2025 telah mencapai **31,07%** dari target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator berada pada jalur yang positif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target jangka menengah. Secara keseluruhan, capaian indikator APS pendidikan kesetaraan menunjukkan kinerja yang optimal dan mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan inklusif. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, khususnya melalui penguatan program pendidikan nonformal dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun Kesetaraan adalah Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- **Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**

Dalam Sub Kegiatan ini Dinas Pendidikan Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dalam hal membantu biaya operasional bagi Sekolah Kesetaraan/PKBM (Paket A, B dan C), agar dapat meringankan beban biaya bagi masyarakat dalam mengikuti pembelajaran di PKBM yang berkualitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan dan pengembangan PKBM;

- **Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**

Dalam sub Kegiatan ini Dinas Pendidikan mengoptimalkan Kegiatan Pendataan anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah atau yang tidak melanjutkan untuk keperluan peningkatan angka partisipasi sekolah 7-18 tahun kesetaraan dan identifikasi terhadap kebutuhan biaya personal maupun perlengkapan SPM bagi siswa kesetaraan.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Kurang akuratnya data yang di gunakan dalam menentukan angka putus sekolah maupun siswa yang tidak melanjutkan sekolah sehingga di butuhkan pendataan secara mandiri dari dinas pendidikan dengan melibatkan opd terkait (Kecamatan dan Kelurahan)
- Latar Belakang yang berbeda menyebabkan terjadinya putus sekolah sehingga perlu adanya pendekatan agar siswa mau melanjutkan sekolahnya, misal : 1) anak yang bekerja demi membantu orang tuanya mencari nafkah, 2) menikah muda, 3) kasus bullying

- Selain itu penyebab putus sekolah atau siswa yang tidak melanjutkan sekolah adalah : 1) anak dengan tunggakan biaya sekolah dan tidak mampu membayar, 2) Bersekolah di pesantren yang tidak terdaftar di dapodik/simpatika sehingga ketika akan mendaftarkan diri ke sekolah formal maupun non formal akan sangat kesulitan dalam hal pemenuhan administrasinya.

Langkah Antisipasi

Langkah Antisipasi yang dapat dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Telah melaksanakan pendataan secara mandiri melibatkan Kecamatan dan Kelurahan dan beberapa relawan yang di ambil dari RT yang ada di masing-masing Kelurahan.
- Selanjutnya Relawan dan RT juga membantu untuk membagi form pendaftaran di PKBM yang ada di Kecamatan agar terjangkau oleh siswa putus sekolah yang ada di Kecamatan tersebut, untuk selanjutnya oleh RT di berikan kepada Kelurahan dan Kelurahan yang akan memfasilitasi untuk memberikan form pendaftaran kepada Pengelola PKBM.
- Mengharapkan agar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM bisa mensosialisasikan kepada pesantren-pesantren terdekat untuk saling bekerja sama untuk memberikan pembelajaran umum dan terdaftar di PKBM sehingga siswa yang terdaftar di pesantren tersebut bisa memiliki ijazah juga dan bisa tetap belajar agama di pesantren.

Berikut Dokumentasi kegiatan tahun 2025 dalam Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun Kesetaraan yang merupakan salah satu Upaya Pemerintah Daerah dalam rangka Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan;





Angka Partisipasi Kasar (APK)

menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

2. Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun

Untuk menghitung Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun di tahun 2025, maka Dinas Pendidikan Kota Tarakan menggunakan rumus:

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk pendidikan dasar usia 7-15 tahun dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk dalam kelompok usia tersebut yang sedang bersekolah, dengan total penduduk dalam kelompok usia yang sama. APS adalah salah satu indikator utama untuk mengukur akses pendidikan dan day APS 7-15 =

$$\frac{\text{Jumlah total penduduk usia 7-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang bersekolah}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 1 Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan, maka dapat dilihat berikut ini :

Tabel 3.15
Capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah (5-6) Tahun
Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2024(%)	2025			Target Akhir Renstra (2025) (%)	Capaian s/d Th. 2030 thd Target Renstra (%)
					Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Angka Partisipasi Sekolah (5-6) Tahun	%	66,76	69,39	85,58	69,04	78,37	113	81,25	71,90

Sumber data : LKIP tahun 2021 s/d 2025

Berdasarkan data pada tabel, indikator **Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun** menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Realisasi pada tahun 2022 sebesar **66,76%** meningkat menjadi **69,39%** pada tahun 2023, dan kembali mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi **85,58%**. Tren ini mencerminkan adanya peningkatan akses serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini.

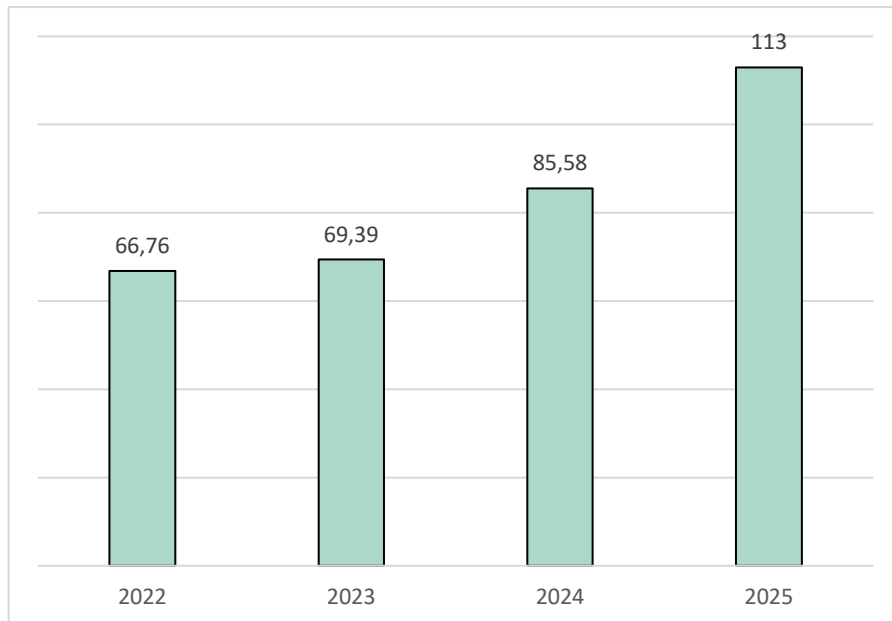
Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar **69,04%**, dengan realisasi mencapai **78,37%**, sehingga capaian kinerja sebesar **113%**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, yang mengindikasikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendorong peningkatan partisipasi pendidikan pada kelompok usia dini.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2025 sebesar **81,25%**, realisasi yang dicapai telah mencapai **71,90%** dari target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator berada pada jalur yang progresif dan mendukung pencapaian target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui berbagai intervensi program, dukungan pembiayaan, serta peningkatan peran serta masyarakat. Ke depan, tren positif ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mencapai target Renstra secara optimal dan berkelanjutan

Untuk Realisasi dan capaian kinerja selama 5 tahun terakhir dapat di gambarkan pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.3
Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Partisipasi (5-6) Tahun



Sumber data : LKIP tahun 2021 s/d 2025

Program/Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut,

adalah Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- **Pengelolaan Dana BOP PAUD**

Dalam Sub Kegiatan ini Dinas Pendidikan Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dalam hal membantu biaya operasional bagi lembaga PAUD, agar dapat meringankan beban biaya bagi masyarakat dalam mengikuti layanan PAUD yang berkualitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan dan pengembangan PAUD;

- **Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD**

Untuk Sub Kegiatan ini Dinas Pendidikan Mengoptimalkan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD dalam pemenuhan SPM PAUD berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018,

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Pengetahuan orang tua calon peserta didik mengenai pentingnya pendidikan pra sekolah untuk mengoptimalkan potensi anak masih belum optimal, anak usia 5-6 tahun seharusnya sudah mengenyam pendidikan namun ada juga orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya;
- Ketidakmampuan untuk memenuhi biaya personal merupakan salah satu faktor penyebab utama anak usia 5-6 tahun dari keluarga miskin belum mendapatkan layanan pendidikan

Langkah Antisipasi

Langkah Antisipasi yang dapat dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- Memperbanyak sosialisasi Program Pelayanan Pendidikan kepada masyarakat dan sekolah khususnya Pra Sekolah.
- Menerapkan sistem pendataan terpadu melalui pemanfaatan aplikasi dan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antara dinas pendidikan dan sekolah untuk verifikasi data satuan PAUD; dan
- Melakukan sosialisasi yang efektif mengenai pentingnya pendidikan pra sekolah bersama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat;
- Pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran ke peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus.

Berikut Dokumentasi kegiatan tahun 2025 dalam Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah yang merupakan salah satu Upaya Pemerintah Daerah dalam rangka Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dengan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini:





3. Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun

Untuk menghitung Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun di tahun 2025, maka Dinas Pendidikan Kota Tarakan menggunakan rumus:

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk pendidikan dasar usia 7-15 tahun dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk dalam kelompok usia tersebut yang sedang bersekolah, dengan total penduduk dalam kelompok usia yang sama. APS adalah salah satu indikator utama untuk mengukur akses pendidikan dan day APS

$$7-15 = \frac{\text{Jumlah total penduduk usia 7-15 tahun yang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-15 tahun}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan, maka dapat dilihat berikut

Tabel 3.16
Capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah (7-15) Tahun Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Angka Partisipasi Sekolah (7-15) Tahun	%	73,58	71,58	97,28

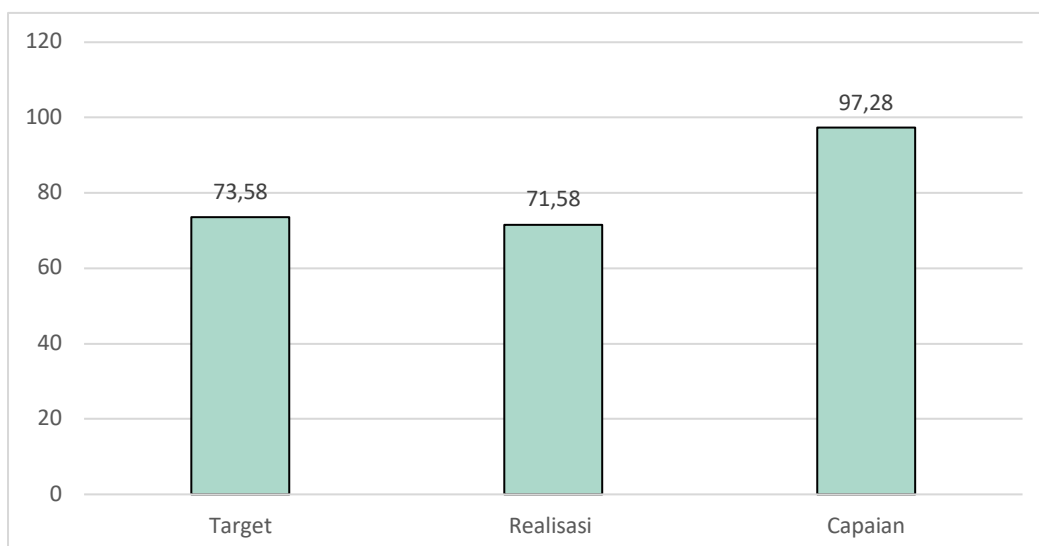
Sumber data : LKIP tahun 2025

Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 73,58%, dengan realisasi sebesar 71,58%. Hal ini menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,28%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan cukup optimal, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Selisih antara target dan realisasi mengindikasikan masih adanya kendala dalam menjangkau seluruh anak usia sekolah, seperti faktor ekonomi keluarga, aksesibilitas wilayah, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Namun demikian, capaian yang mendekati target mencerminkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar telah menunjukkan hasil yang positif.

Ke depan, diperlukan penguatan strategi seperti peningkatan sosialisasi wajib belajar, pemberian bantuan pendidikan, serta pemerataan akses layanan pendidikan guna memastikan seluruh anak usia 7–15 tahun dapat bersekolah secara optimal

Grafik 3.4
Capaian Kinerja Angka Partisipasi (7-15) Tahun
Tahun 2025



Sumber data : LKIP 2025

Program/Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan

Program Pengelolaan Pendidikan yang diimplementasikan melalui kegiatan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik

Sub kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pemberian bantuan langsung kepada peserta didik, yaitu:

- Bantuan bagi peserta didik kurang mampu, berupa dana sebesar Rp1.000.000 per peserta didik yang diberikan pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), guna memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.
- Bantuan bagi peserta didik berprestasi, yang diberikan kepada siswa dengan peringkat 1 sampai dengan 3 di masing-masing rombongan belajar, sebagai bentuk motivasi untuk mempertahankan prestasi sekaligus mendorong keberlanjutan pendidikan ke jenjang berikutnya.

b. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Melalui sub kegiatan ini, Dinas Pendidikan mengoptimalkan pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. Dana BOS digunakan untuk:

- Mendukung operasional sekolah
- Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan
- Meningkatkan mutu proses pembelajaran

Program ini secara langsung mendukung kebijakan wajib belajar 12 tahun dan mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat.

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik

Kegiatan ini memiliki pola yang sama dengan jenjang SD, yaitu:

- Bantuan bagi peserta didik kurang mampu
- Bantuan bagi peserta didik berprestasi

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pendidikan dari jenjang SD ke SMP.

b. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Optimalisasi dana BOS pada jenjang SMP difokuskan pada:

- Peningkatan kualitas pembelajaran
- Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah
- Perluasan akses pendidikan menengah pertama

Hambatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian APS usia 7–15 tahun, antara lain:

1. Proses validasi data penerima bantuan yang memerlukan waktu cukup lama, karena harus melalui verifikasi berlapis guna menghindari duplikasi bantuan dan memastikan ketepatan sasaran. Proses ini melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dukcapil.
2. Ketidaksinkronan data antar sistem, seperti Dapodik dan DTKS, yang menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan.
3. Adanya revisi anggaran di tengah tahun berjalan, yang berdampak pada keterlambatan realisasi program dan penyaluran bantuan kepada peserta didik.
4. Keterbatasan aksesibilitas di wilayah tertentu, khususnya daerah pinggiran, yang masih menghadapi kendala jarak tempuh ke sekolah, keterbatasan sarana transportasi, serta distribusi satuan pendidikan yang belum merata.
5. Adanya peserta didik yang tidak terdata dalam sistem Dapodik, seperti yang bersekolah di luar daerah atau di lembaga pendidikan nonformal, sehingga tidak terhitung dalam indikator APS.

Langkah Antisipasi

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Optimalisasi sistem validasi data penerima bantuan melalui integrasi data antara Dapodik, DTKS, dan data kependudukan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor (RT, Kelurahan, Kecamatan, Dinas Sosial, dan Dukcapil), guna memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari duplikasi.

2. Penguatan perencanaan program dan anggaran, sehingga apabila terjadi revisi anggaran, dampaknya terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyaluran bantuan dapat diminimalkan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data pendidikan, untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
4. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui:
 - Penyediaan subsidi atau fasilitas transportasi bagi peserta didik di wilayah terpencil
 - Koordinasi dengan pemerintah daerah terkait peningkatan infrastruktur pendukung akses pendidikan
5. Optimalisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menjamin layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.
6. Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data, sehingga setiap kendala dapat diidentifikasi lebih dini dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan APS usia 7–15 tahun. Namun demikian, berdasarkan pengamatan, keberhasilan peningkatan partisipasi tidak hanya bergantung pada bantuan finansial, tetapi juga pada kualitas sistem data, ketepatan sasaran program, dan kemudahan akses layanan pendidikan.

Dengan demikian, pendekatan ke depan perlu lebih terintegrasi antara aspek akses, kualitas, dan tata kelola, agar peningkatan angka partisipasi sekolah dapat berkelanjutan serta berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia

Rata-Rata Kemampuan Literasi berdasarkan Asesmen Nasional

Rata-Rata Kemampuan Literasi berdasarkan Asesmen Nasional merupakan Rata-rata kemampuan literasi peserta didik yang dapat dilihat melalui nilai indeks literasi yang diperoleh dari Asesmen Nasional (AN). Nilai indeks literasi menunjukkan proporsi murid yang berada di tingkat kompetensi literasi tertentu.

- Asesmen literasi AN bertujuan untuk menguji kemampuan peserta didik dalam memahami dan membaca teks.

- Nilai indeks literasi 3,00 berarti semua murid berada di tingkat kompetensi literasi mahir.
- Nilai indeks literasi 1,00 berarti semua murid berada di tingkat kompetensi literasi yang perlu intervensi khusus.
- Kemampuan literasi yang baik dapat membantu peserta didik dalam proses belajar dan meningkatkan kemampuan akademik mereka.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kemampuan literasi siswa, di antaranya:

- Rendahnya motivasi belajar dari orang tua maupun guru.

Rumus untuk menghitung rata-rata kemampuan literasi siswa dapat dihitung dengan menghitung rata-rata kecepatan baca dan persentase pemahaman bacaan.

- Rata-rata kecepatan baca
- Hitung jumlah kata yang dibaca
- Hitung waktu tempuh baca, biasanya dalam waktu 1 menit
- Bagikan jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 1 Tujuan 1 dengan indikator kinerja Rata-Rata Kemampuan Literasi SD & SMP berdasarkan Asesmen Nasional, maka dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja tahun 2025(%)	Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RENSTRA (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Rata-Rata Kemampuan Literasi berdasarkan Asesmen Nasional	%	69,36	82,33	118	73,58	71,58	97,28	80,58	82,83

Sumber : Raport Pendidikan Kota Tarakan, 2025

Indikator *Rata-Rata Kemampuan Literasi berdasarkan Asesmen Nasional* menunjukkan kinerja yang cukup baik dan cenderung meningkat. Pada tahun 2024, realisasi capaian sebesar **82,33%** berhasil melampaui target

yang ditetapkan yaitu **69,36%**, dengan tingkat capaian kinerja mencapai **118%**. Hal ini menunjukkan bahwa program peningkatan literasi telah berjalan efektif dan memberikan hasil di atas ekspektasi.

Sementara itu, pada tahun 2025, target yang ditetapkan meningkat menjadi **73,58%**, dengan realisasi sebesar **71,58%** atau mencapai **97,28%** dari target. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut masih tergolong tinggi dan menunjukkan konsistensi kinerja yang baik.

Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA sebesar **80,58%**, maka capaian hingga tahun 2024 telah mencapai **82,83%** dari target akhir. Hal ini menandakan bahwa progres pencapaian indikator sudah berada pada jalur yang tepat dan mendekati target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Secara umum, kinerja indikator literasi ini menunjukkan tren positif, namun tetap diperlukan penguatan program, khususnya dalam menjaga konsistensi peningkatan agar target RENSTRA dapat tercapai secara optimal pada periode akhir.

Rata-Rata Kemampuan Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional

Numerasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka dan simbol matematika dasar. Numerasi juga mencakup kemampuan untuk menganalisis informasi dalam bentuk grafik, tabel, dan bagan.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kemampuan numerasi peserta didik, di antaranya:

- Kurangnya pembiasaan guru untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan numerasi

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik, di antaranya: Memberikan pelatihan guru melalui Platform Merdeka Mengajar, Menyediakan materi pembelajaran daring dan hibrida, Membuat modul asesmen diagnostik untuk mengukur numerasi, Menyederhanakan materi kurikulum.

Cara menghitung nilai rata-rata numerasi adalah dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah nilai data tersebut.

Langkah-langkah untuk menghitung nilai rata-rata adalah:

1. Kumpulkan semua nilai data yang akan dihitung rata-ratanya
2. Jumlahkan seluruh nilai data tersebut
3. Hitung jumlah total data yang ada
4. Bagi hasil penjumlahan nilai data dengan jumlah total data

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 1 Tujuan 1 dengan indikator kinerja Rata-Rata Kemampuan Literasi SD & SMP berdasarkan Asesmen Nasional, maka dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.18
Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024(%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja tahun 2025(%)	Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RENSTRA (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Rata-Rata Kemampuan Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional	%	59,15	72,20	122	61,35	59,15	96,41	70,15	72,76

Sumber : Raport Pendidikan Kota Tarakan, 2025

Indikator *Rata-Rata Kemampuan Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional* menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik dengan kecenderungan positif. Pada tahun 2024, realisasi sebesar **72,20%** berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu **59,15%**, dengan capaian kinerja mencapai **122%**. Hal ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan kemampuan numerasi peserta didik berjalan sangat efektif dan melebihi ekspektasi yang direncanakan.

Pada tahun 2025, target meningkat menjadi **61,35%**, namun realisasi yang dicapai sebesar **59,15%** atau **96,41%** dari target. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian ini masih tergolong baik dan menunjukkan bahwa kinerja tetap terjaga, meskipun terdapat sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA sebesar **70,15%**, maka capaian hingga tahun 2024 telah mencapai **72,76%** dari target akhir tersebut. Ini menunjukkan bahwa progres pencapaian indikator numerasi sudah berada pada jalur yang cukup optimal dan mendekati sasaran jangka menengah.

Secara keseluruhan, kinerja indikator numerasi menunjukkan hasil yang baik dengan capaian signifikan pada tahun 2024, namun perlu adanya penguatan strategi pada tahun berikutnya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara konsisten hingga akhir periode RENSTRA.

Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B

Program dan kegiatan

Program yang dilaksanakan adalah **Program Pengelolaan Pendidikan** dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk mendukung peningkatan jumlah satuan pendidikan terakreditasi minimal B.

Terakreditasi di tahun 2025, maka Dinas Pendidikan Kota Tarakan menggunakan rumus :

Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B adalah ukuran yang menunjukkan persentase satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan) yang telah memperoleh peringkat akreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) atau Badan Akreditasi Nasional Pendidik

$$\text{Proporsi Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B (\%)} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Satuan Pendidikan yang Telah Diakreditasi}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B} \times 1/MI}$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 1 dengan indikator kinerja SD/MI Terakreditasi, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 3.19
Capaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024(%) Target	Tahun 2025		Capaian Kinerja tahun 2025(%)	Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir RENSTRA (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal	%	100	94,59	94,59	100	94,59	94,59	100	94,59

Secara umum, sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pembangunan dan Pengadaan Fisik

- Pembangunan gedung, ruang kelas, dan ruang guru
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
- Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah
- Pembangunan ruang penunjang pembelajaran

2. Rehabilitasi

- Rehabilitasi sedang/berat gedung dan ruang kelas
- Rehabilitasi sedang/berat ruang guru dan ruang penunjang
- Rehabilitasi sedang/berat laboratorium
- Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas

3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
- Pengadaan mebel sekolah
- Pengadaan perlengkapan sekolah dan siswa

4. Penyelenggaraan Pembelajaran dan Manajemen

- Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik
- Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
- Pengelolaan dana operasional satuan pendidikan

Hambatan dan kendala

Hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan jumlah satuan pendidikan terakreditasi minimal B dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Kondisi Fisik Bangunan

Masih banyak satuan pendidikan yang belum memiliki gedung sendiri, atau memiliki gedung namun berstatus tidak permanen dan belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kondisi ini menjadi penghambat utama dalam proses akreditasi karena standar sarana fisik merupakan salah satu komponen penilaian yang cukup signifikan.

Sarana Prasarana dan Utilitas

Sarana prasarana dan utilitas pada berbagai satuan pendidikan secara umum masih belum memadai dan belum memenuhi SNP. Alat praktik dan peraga siswa juga masih sangat terbatas, sehingga berpengaruh langsung terhadap pemenuhan standar proses dan standar sarana prasarana dalam penilaian akreditasi.

Langkah antisipasi

Langkah antisipasi yang ditempuh untuk mendorong peningkatan jumlah satuan pendidikan terakreditasi minimal B meliputi:

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Fisik

Melaksanakan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana melalui berbagai skema, antara lain pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi, renovasi, serta pemberian bantuan peralatan pendidikan, guna memenuhi standar sarana prasarana yang menjadi komponen penilaian akreditasi.



Iklm Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas

Iklm keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas dalam pendidikan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan mutu layanan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai keagamaan dan kemajemukan bangsa.

Iklm keamanan merujuk pada kondisi satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan fisik, psikologis, perundungan, dan segala bentuk intoleransi. Hal ini sejalan dengan kebijakan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Lingkungan yang aman menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan proses pembelajaran karena memberikan rasa terlindungi dan meningkatkan partisipasi aktif peserta didik.

Iklm kebhinekaan mencerminkan implementasi nilai keberagaman dalam kehidupan sekolah yang selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks pendidikan, kebhinekaan diwujudkan melalui sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa. Kebijakan ini diperkuat melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 yang menempatkan nilai nasionalisme, gotong royong, dan integritas sebagai bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik.

Iklm inklusivitas menekankan pada prinsip kesetaraan akses dan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Hal ini diatur dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutuan padiskriminasi.

Pendekatan inklusif juga sejalan dengan prinsip *education for all* dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek pendidikan berkualitas dan inklusif.

Ketiga aspek tersebut juga menjadi bagian penting dalam pengukuran mutu pendidikan melalui Asesmen Nasional, khususnya pada dimensi survei karakter dan lingkungan belajar yang menilai persepsi peserta didik terhadap keamanan, toleransi, dan inklusivitas di sekolah.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari kondisi lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter dan sosial peserta didik.

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 1 Tujuan 1 dengan indikator kinerja Iklim Keamanan SD & SMP, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.20
Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja tahun 2025(%)	Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RENSTRA (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Persentase Rata-Rata Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas	%	89,56	67,32	75,16	69,12	70,00	101,27	75,32	74,37

Sumber : Raport Pendidikan Kota Tarakan, 2025

Indikator Persentase Rata-Rata Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas pada tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar **67,32%** dari target **89,56%**, dengan capaian kinerja **75,16%**, yang mencerminkan bahwa capaian kinerja masih berada di bawah target yang ditetapkan dan menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu menjadi perhatian.

Pada tahun 2025, realisasi meningkat menjadi **69,12%** dari target **70,00%**, dengan capaian kinerja **101,27%**, yang menunjukkan bahwa target tahun berjalan telah berhasil dilampaui. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara kumulatif, capaian hingga tahun 2024 terhadap target akhir RENSTRA sebesar **75,32%** telah mencapai **74,37%**, yang menunjukkan bahwa capaian indikator sudah mendekati target akhir yang ditetapkan, meskipun masih memerlukan upaya optimalisasi untuk memastikan target dapat tercapai secara penuh pada akhir periode.

Iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas merupakan kondisi lingkungan satuan pendidikan yang menjamin rasa aman, menghargai keberagaman, serta

memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik. Iklim yang baik ditandai dengan sikap inklusif, toleransi, tidak diskriminatif, serta adanya komitmen kebangsaan dalam kehidupan sekolah.

Ciri-ciri iklim yang baik antara lain:

- Terciptanya rasa aman bagi seluruh warga sekolah
- Sikap inklusif dan saling menghargai
- Toleransi terhadap perbedaan agama, budaya, dan latar belakang
- Tidak adanya diskriminasi dalam lingkungan sekolah
- Adanya kerja sama dan interaksi positif antar peserta didik

Dengan terciptanya iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas yang baik, satuan pendidikan mampu membentuk lingkungan belajar yang harmonis, mendorong peserta didik untuk menerima perbedaan, serta memperkuat karakter sebagai bagian dari masyarakat yang majemuk.

Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan.

Untuk Nilai SAKIP Dinas Pendidikan di tahun 2025 berdasarkan atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Tim Inspektorat Kota Tarakan Nomor 700.1.2.1/10/V/2025/Inspektorat tanggal 27 Mei 2025 pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 2 dengan indikator kinerja Nilai SAKIP, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.21
Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

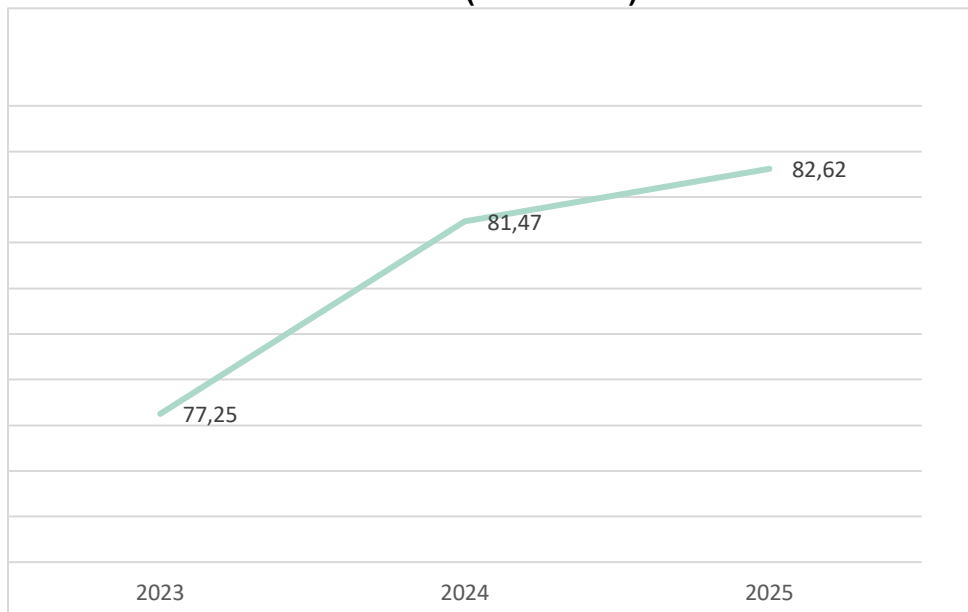
Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja tahun 2025(%)	Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RENSTRA (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Nilai SAKIP	%	81,61	81,61	100	81,77	82,51	100,90	82,62	82,62

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2024

Indikator *Nilai SAKIP* pada tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar **81,61%** yang telah sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan sebesar **81,61%**, dengan capaian kinerja mencapai **100%**. Pada tahun 2025, realisasi meningkat menjadi **82,51%** dari target **81,77%**, sehingga capaian kinerja tetap berada pada level **100,90%**.

Secara kumulatif, capaian hingga tahun 2023 terhadap target akhir RENSTRA sebesar **82,62%** telah mencapai **82,62%**, yang menunjukkan bahwa kinerja penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah memenuhi target akhir RENSTRA. Peningkatan nilai ini mencerminkan penguatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang semakin efektif dan akuntabel

Grafik 3.18
Nilai SAKIP (2023-2025)



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2025

Capaian Indikator Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Kota Tarakan pada Tahun 2025 diperoleh nilai/skor **82,62** atau dengan huruf yaitu **BB (Sangat Baik)** mengalami peningkatan setelah tahun 2024 mencapai nilai/skor **81,47** atau dengan huruf yaitu **BB (Sangat Baik)**. Nilai sebagaimana yang disebutkan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.22
Capaian Evaluasi SAKIP Tahun 2025
Dinas Pendidikan

NO	Komponen	Bobot	Hasil Penilaian	% Terhadap Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,27	77,56
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,97	76,56
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,70	91,33
4	Evaluasi Internal	25,50	22,58	90,32

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Inspektorat Kota Tarakan, 2025

Jika di lihat dari hasil tersebut dapat dimaknai bahwa sudah ada komitmen dari Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kinerjanya, dan adanya Kepatuhan-Kepatuhan untuk melaksanakan setiap kegiatan sesuai Peraturan yang berlaku.

Persentase LHP yang ditindaklanjuti

Untuk Persentase LHP yang ditindaklanjuti di tahun 2025, maka Dinas Pendidikan Kota Tarakan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah LHP yang ditindaklanjuti}}{\text{Nilai SAKIP}} \times 100$$

$$\text{Jumlah LHP}$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 3 dengan indikator kinerja Persentase LHP yang ditindaklanjuti, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.23
Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun	Tahun 2025		Capaian Kinerja tahun 2024(%)	Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			

				2024 (%)					RENSTR A (%)
Persentase LHP yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2025

Berdasarkan tabel 3.31 dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 tercapai **100%** dengan kategori **sangat tinggi** (90%-100%), dan pada Tahun 2024 sudah mencapai **100%** (90%-100%) dengan kategori **sangat tinggi**. Jika kinerja tahun 2024 di ukur melalui target akhir RENSTRA maka capaian kinerja yang di capai sudah mencapai **100%** dengan kategori **sangat tinggi** (90%-100%). Dari **100%** yang telah kami tindaklanjuti dapat dikatakan bahwa sudah ada komitmen dari Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan temuan dan selalu dipantau oleh Inspektorat, dan adanya Kepatuhan-Kepatuhan terhadap hasil temuan dan tindak lanjut sesuai Peraturan yang berlaku.

Nilai IKM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pada dasarnya pelaksanaan survey IKM sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Yang merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Kategori jawaban terdiri dari empat tingkat dari tingkat kurang baik diberi nilai 1 (satu) sampai dengan tingkat sangat baik dan diberi nilai 4 (empat).

Kegiatan penyusunan IKM dimaksudkan untuk mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat melalui survei kepada masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan Pemerintah di wilayah. Tujuannya untuk mendapatkan *feedback* secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 2 dengan indikator kinerja Nilai IKM, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.24
Capaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja tahun 2025(%)	Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir RENSTRA (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Nilai IKM	%	84,14	85,12	101,16	85,14	86,70	101	85,82	85,82

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan 2025

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tabel ini menyajikan capaian indikator **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta tingkat pencapaiannya terhadap Target Akhir RENSTRA. Pada Tahun 2024 ditetapkan target sebesar **84,14%**, dengan realisasi sebesar **85,12%**, sehingga capaian kinerja terhadap target mencapai **101,16%**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan

masyarakat atas layanan yang diberikan telah melampaui target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar **85,14%**, dengan realisasi sebesar **86,70%**, sehingga capaian kinerja Tahun 2025 tercatat sebesar **101%**. Target Akhir RENSTRA ditetapkan sebesar **85,82%**, dan capaian sampai dengan Tahun 2023 terhadap target akhir RENSTRA tercatat **85,82%**, yang menunjukkan bahwa indikator Nilai IKM telah memenuhi target RENSTRA secara optimal dan perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan

Jika di lihat dari hasil tersebut dapat dimaknai bahwa sudah ada komitmen dari Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kinerja pelayanannya dan adanya Kepatuhan-Kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan yang berlaku. Nilai sebagaimana yang disebutkan merupakan akumulasi penilaian terhadap 9 unsur pelayanan yang di evaluasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.25
HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN PUBLIK
PADA Dinas Pendidikan KOTA TARAKAN
KOTA TARAKAN

No	Unsur Pelayanan	Rata-Rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,331
U2	Prosedur Pelayanan	3,339
U3	Kecepatan Pelayanan	3,521
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,570
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,58
U6	Kompetensi Petugas	3,369
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,579
U8	Penanganan Pengaduan	3,750
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,248

IKM UNIT PELAYANAN :	86,70
----------------------	-------

Mutu Pelayanan :	Baik	
------------------	------	--

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

Untuk membandingkan capaian kinerja Nilai IKM baru dapat kita sajikan 2 tahun, karna indikator ini merupakan indikator awal RENSTRA 2025-2029. Di RENSTRA sebelumnya Dinas Pendidikan tidak menggunakan Indikator ini.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Secara umum pencapaian kinerja untuk 2 sasaran pada tahun 2025 terdapat 9 (*sembilan*) sasaran yang sudah masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori **sangat tinggi**. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal.

Adapun penyebab internal, antara lain:

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2025
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap semester rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- e. Optimalnya penyebaran informasi melalui whatsapp terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Kota Tarakan.

- b. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- **Penguatan Pelaku Pendidikan**, dengan melakukan pemberdayaan melalui peningkatan kompetensi, kinerja, dan apresiasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya pemberdayaan dilakukan dengan melakukan kemitraan dan penguatan peran orang tua, dan pelibatan masyarakat dalam aktivitas pendidikan dan kebudayaan, untuk Kota Tarakan sudah kita laksanakan dengan pelibatan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan mendapatkan respon yang positif di masyarakat.
 - **Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan**, peningkatan akses adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan tersedianya akses tersebut, maka kualitas pendidikan pun terus ditingkatkan dengan penyempurnaan kurikulum dan sistem penilaian pendidikan. Untuk mendukung anak-anak kita yang kurang mampu sebagai wujud meningkatkan akses pendidikan adalah pelaksanaan Program Indonesia Pintar dari Kemdikbud dan Beasiswa Prestasi bagi Siswa Berprestasi dan Beasiswa tidak mampu bagi siswa tidak mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan melalui Dinas Pendidikan.
 - **Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**, diwujudkan dengan peningkatan kompetensi, peningkatan kinerja, pemberian tunjangan atau insentif bagi guru non-PNS, dan peningkatan kualifikasi pendidikan.

Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas, terutama tenaga teknis yang membidangi suatu kegiatan.
- b. Sulitnya mendapatkan ketersediaan data penduduk untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- d. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya} \times 100}{\text{Target Biaya}} \right]$$

Pada tahun 2025 realisasi jumlah anggaran realisasi fisik dan keuangan Dinas Pendidikan adalah **Rp.277.912.528.847,-** sementara target biaya yaitu **Rp. 295.632.971.811,-**. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya adalah **5,43 %**. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. (dapat dilihat pada Tabel 2.3 Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan)

Analisis Program Kegiatan yang menunjang pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan adalah sebanyak **6 Program** dan **13 Kegiatan**. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 215.301.569.391.00.-** dan realisasi keuangan mencapai Rp. **202,562.421.224-** dengan realisasi fisik **99,95%** dan realisasi keuangan **94.58%**, yang diarahkan untuk Kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 3.26
Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan Dana	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	213.993.023.040.00	202.562.421.224.00	100	94,66
2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	41.108.000.00	38.480.000.00	100	93.61
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.768.983.00	4.468.840.00	37.20	32.46
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.559.120.00	313.290.800.00	96.90	93.09
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.272.000.00	73.250.000.00	100	98.80
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.338.249.00	219.098.388.00	72.47	72.47
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	536.500.000.00	422.616.810.00	99.78	78.63

b. Program Pengelolaan Pendidikan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 79.868.119.720.00.-** dan realisasi keuangan mencapai Rp. **73.941.818.469,-** dengan realisasi fisik **98.19%** dan realisasi keuangan **92.58%**, yang diarahkan untuk Kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 3.27
Kegiatan Program Pengelolaan Pendidikan

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan Dana	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	42.268.497.145.,00	38.567.277.276.00	96.95	91.20
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.478.870.750.00	21.558.226.248.00	99,64	91.82
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.451.660.950.000	10.236.153.915.00	99.66	97,94
4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3.651.090.875.00	3.580.161.030.00	98,91	98.06

c. Program Pengembangan Kurikulum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 69.867.200.00.-** dan realisasi keuangan mencapai Rp. **41.039.316.00.-** dengan realisasi fisik **72.95 %** dan realisasi keuangan **58.74 %**, yang diarahkan untuk Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Muatan lokal disusun bertujuan untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya.

Dokumentasi Penyusunan Muatan Lokal



d. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 315.815.500.-** dan realisasi keuangan mencapai Rp. **254.045.000.00,-** dengan realisasi fisik **89.7 %** dan realisasi keuangan **80.44%**, yang diarahkan untuk Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 35.000.000.00.-** dan realisasi keuangan mencapai Rp. **0,-** dengan realisasi fisik **0 %** dan realisasi keuangan **0 %**, yang diarahkan untuk Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 42.600.000.00.-** dan realisasi keuangan mencapai **Rp. 42.000.000.00,-** dengan realisasi fisik **100 %** dan realisasi keuangan **98.58**, yang diarahkan untuk Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

B. Realisasi Anggaran

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Dari Keseluruhan Indikator ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, **Permasalahan** yang dihadapi, antara lain :

1. Tren sosial terhadap pilihan sekolah oleh orang tua/wali siswa yang cenderung memilih masuk ke sekolah negeri karena gratis dan sebagian memilih sekolah swasta namun di luar Kota Tarakan seperti Madrasah/Pesantren.
2. Intervensi pembangunan ruang kelas baru yang lebih ditujukan untuk memenuhi rasio jumlah rombongan belajar : ruang kelas di tingkat satuan pendidikan,
3. Implementasi PP Nomor 2/2018 dan Permendikbud Nomor 32/2018 mengenai pelaksanaan SPM guna menarik anak-anak yang belum bersekolah untuk bersekolah belum optimal, dikarenakan Regulasi yang tidak sepadan/tidak sesuai dengan yang ada di Daerah Kabupaten/Kota.
4. Tingkat kesejahteraan sosial siswa yang ingin dikatakan rendah yang masih menjadi kendala bagi penduduk usia sekolah untuk dapat bersekolah,
5. Akses ketersediaan sarana bersekolah di daerah-daerah tertentu yang belum mencukupi atau radius jarak yang cukup jauh,
6. Ketidak terbukaan orang tua terhadap siswa berkebutuhan khusus yang seharusnya bisa terlayani.
7. Kurangnya Ruang Kelas Baru (RKB) untuk memenuhi system zonasi penerimaan siswa baru.
8. Sarana Prasarana yang masih kurang memadai terutama di Sekolah Swasta.
9. Kesadaran Pendidik dalam meningkatkan Kualifikasi Pendidikannya masih kurang terutama Pendidik PAUD.
10. Belum dapat mempublish informasi/produk yang dihasilkan terhadap masyarakat, di sebabkan karna kurangnya SDM tekhnis yang mampu menyusun dan mengupdate data.
11. Ketidak tersediaan data yang seharusnya menjadi tupoksi kegiatan yang dilaksanakan.

Upaya

Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Mendorong peningkatan mutu dan kualitas sekolah swasta agar masyarakat terdorong untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah swasta, sekolah

swasta diharapkan dapat bersaing dan memberikan yang terbaik bagi siswa siswinya walaupun dengan membayar mahal melalui hasil yang dapat mereka terima;

2. Melakukan intervensi sarana prasarana yang tepat sasaran terhadap daerah-daerah yang benar-benar membutuhkannya;
3. Bekerjasama dengan SKPD dan Instansi terkait dalam hal pendataan dan verifikasi data dalam penentuan siswa dan siswi yang sudah tidak bersekolah untuk kemudian di tindaklanjuti kebutuhan mereka agar dapat bersekolah kembali;
4. Meningkatkan ketepatan sasaran Pelayanan Dasar Siswa dan penggunaan dana BOS, BOP, Beasiswa Miskin, Beasiswa Prestasi dan PIP;
5. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan seperti program USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan pendidikan lainnya;
6. Peningkatkan koordinasi antar Dinas Pendidikan terhadap Dinas Pendidikan Provinsi terutama dalam hal penyaluran anggaran dan keabsahan data perencanaan program kegiatan yang memberikan akses seluas-luasnya bagi anak berkebutuhan khusus.
7. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
8. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
9. Mengurangi angka putus sekolah
10. Mengefektifkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam menjaring anak tidak sekolah dan anak putus sekolah untuk mendapat pendidikan kesetaraan melalui kegiatan Paket A, B, dan C.
11. Peningkatan mutu pembelajaran, karena dengan mutu pembelajaran yang baik siswa akan termotivasi kuat untuk meneruskan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi.
12. Penguatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk dapat melaksanakan pendidikan secara lebih baik dan profesional, termasuk dalam memahami kurikulum dan menerapkannya di kelas secara lebih baik.
13. Transparansi terhadap informasi/produk yang di berikan, mampu bekerja sama bersama pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung dapat ikut memberikan pengawasan dan memfasilitasi akses informasi/produk yang diberikan.

14. Adanya Partisipasi terhadap keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan, masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan.
15. Proses akuntabilitas yang terstruktur diharapkan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat.
16. Melaksanakan Koordinasi agar efisiensi dan efektivitas kerja tidak terganggu.

Selanjutnya Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam Dokumen Pengesahan anggaran Dinas Pendidikan tahun 2025, maka realisasi dari capaian keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.28
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis
Program Prioritas Dinas Pendidikan
Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target 2025		Capaian Keuangan (%)
		Target	Realisasi	
T1 Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan				
S1 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan				
Indikator Sasaran Strategis PD	APS 5-6 Tahun	79.868.119.720,-	73.941.818.469,-	92,58
	APK PAUD			
	APM PAUD			
	APS 7-12 Tahun			
	APS 13-15 Tahun			
	APK SD/MI			
	APK SMP/MTs			
	APM SD/MI			
	APM SMP/MTs			
	Angka Melek Huruf			
	PAUD Terakreditasi			

	PKBM Terakreditasi			
	SD/MI Terakreditasi			
	SMP/MTs Terakreditasi			
	Persentase pendidik yang berkualifikasi S1-/D-4	315.815.500,-	254.045.000,-	80,44

Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni PAUD	9.905.644.950,-	9.691.984.915,-	97,95
	Angka Partisipasi Murni SD/MI	36.078.873.345,-	33.660.741.028,-	93,30
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	22.154.569.250,-	20.255.546.538,-	91,43
	Rasio siswa per kelas SD	3.883.623.800,-	3.823.560.448,-	98,45
	Rasio siswa per kelas SMP	512.000.000,-	499.999.500,-	97,66
	Rasio siswa per rombongan belajar SD	1.050.000.000,-	1.044.347.800,-	99,46
	Rasio siswa per rombongan belajar SMP	730.000.000,-	727.186.000,-	99,61
	Rasio siswa per kelas PAUD	546.016.000	544.169.000	99,66
	Angka Kelulusan SD/MI	25.905.500,-	25.318.840,-	97,74
	Angka Kelulusan SMP/MTs	29.919.400,-	20.955.398	70,04
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	51.588.745,-	30.562.620,-	59,24
	Angka putus sekolah SD/MI	3.651.090.875,-	3.580.161.030,-	98,06
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah siswa usia 7-12 tahun yang memperoleh pendidikan SD/MI	42.286.497.145	38.567.277.276,-	91,20
	Jumlah ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik			
	Jumlah sekolah terakreditasi B			
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2.777.600.000,-	2.720.739.548,-	97,95
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	67.360.000,-	47.700.000,-	70,81
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	26.486.000,-	26.072.380,-	98,44
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	33.847.545,-	19.135.000,-	56,53

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengolah Dana BOS	33.785.563.200,-	31.592.213.824,-	93,51
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	4.006.500,-	2.200.000,-	54,91
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	10.004.800,-	9.710.000,-	97,05
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	21.841.400,-	18.036.764,-	83,75
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	8.500.000,-	8.500.000,-	100
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	16.416.400,-	13.749.220,-	83,75
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	8.857.000,-	0,-	0,-
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	8.699.000,-	8.020.000,-	92,19
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	17.052.000,-	8.080.000,-	47,38
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	19.950.000,-	19.950.000,-	100
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	40.000.000,-	38.628.000,-	96,57
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang terbangun	1.106.023.800,-	1.102.820.900,-	99,71
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang di rehab	150.000.000,-	149.495.000,-	99,66
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	15.834.000,-	9.980.000,-	6,03
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	25.905.500,-	25.318.840,-	97,74
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	<i>Jumlah Sekolah yang di Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</i>	900.000.000,-	894.852.800,-	99,43

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.008.550.000,-	1.852.075.000,-	92,21
Pengadaan Alat Praktek dna Peraga Peserta Dididi	Jumlah Pengadaan Alat Praktek dna Peraga Peserta Didik	1.234.000.000,-	0,-	0,-
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa usia 13-15 tahun yang memperoleh pendidikan SD/MI	23.478.870.750,-	21.558.226.248,-	91,82
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik			
	Jumlah SMP/MTs terakreditasi B	23.478.870.750,-	21.558.226.248,-	91,82
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sekolah yang di Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	730.000.000,-	727.186.000,-	99,61
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	512.000.000,-	512.000.000,-	97,66
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	82.301.500,-	75.494.210,-	91,73
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.404.153.450,-	1.306.496.602,-	93,05
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	248.357.300,-	170.035.353,-	68,46
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	40.653.000,-	404.645.000,-	99,98
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	17.741.200,-	11.427.620,-	64,41
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	20.270.970.600,-	18.619.464.426,-	91,85
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	3.780.000,-	0,-	0,-
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	18.634.800,-	18.197.219,-	97,65
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	15.809.000,-	13.200.000,-	83,50
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	26.757.100,-	23.218.840,-	86,78,-
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	18.761.100,-	7.056.080,-	37,61,-

Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	8.230.000,-	0,-	0,-
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	7.700.000,-	7.000.000,-	90,91
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	12.287.500,-	9.850.000,-	80,16
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	29.919.400,-	20.955.398,-	70,04
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	10.814.800,-	8.000.000,-	73,97
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	20.000.000,-	0,-	0,-
Pengelolaan Pendidikan PAUD	Jumlah siswa usia 5-6 tahun yang memperoleh pendidikan PAUD	10.451.660.950,-	10.236.153.915,-	97,94
Pengelolaan Pendidikan PAUD	Jumlah ruang kelas PAUD dalam kondisi baik	10.451.660.950,-	10.236.153.915,-	97,94
	Jumlah PAUD terakreditasi B			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	232.000.000,-	232.000.000,-	100
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD yang tersedia	8.778.831.600,-	8.640.523.238,-	98,42
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	8.345.000,-	7.223.180,-	86,56
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	21.607.400,-	15.292.380,-	70,77
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	17.321.400,-	16.051.400,-	92,67
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	60.421.400,-	40.870.831,-	67,64
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	20.291.350,-	18.777.340,-	92,54

Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	18.625.700,-	14.906.930,-	80,03
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	546.016.000,-	546.016.000,-	99,50
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	23.233.100,-	23.115.840,-	99,50
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	25.020.000,-	15.120.000,-	60,43
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100.000.000,-	99.927.800,-	99,93
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	599.948.000,-	568.175.976,-	94,70
Pengelolaan Pendidikan Non Formal	Jumlah siswa usia 7-18 tahun yang memperoleh pendidikan Kesetaraan	3.651.090.875,-	3.580.161.030,-	98,06
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah siswa di atas 18 Tahun yang memperoleh pendidikan kesetaraan	3.651.090.875,-	3.580.161.030,-	98,06
	Jumlah PKBM Terakreditasi B			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa di atas 18 Tahun yang memperoleh pendidikan kesetaraan	83.259.025,-	45.500.000,-	54,46
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PKBM Terakreditasi B	31.711.350,-	31.086.240,-	98,03
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	3.365.787.600,-	3.353.539.990,-	99,64
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	27.436.300,-	25.476.200,-	92,86
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	15.988.950,-	12.291.600,-	76,88

Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	16.551.450,-	13.141.600,-	79,40
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	37.512.200,-	33.501.400,-	89,31
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	43.189.000,-	40.884.000,-	94,66
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	29.658.000,-	24.740.000,-	83,42
Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah siswa usia 7-15 tahun yang memperoleh Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	69.867.200,-	41.039.316,-	58,74
Program Pengembangan Kurikulum Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rasio Jumlah Satuan Pendidikan yang memperoleh Kurikulum Muatan Lokal	69.867.200,-	41.039.316,-	58,74
	Rasio Jumlah Satuan Pendidikan			
	Jumlah siswa usia 7-15 tahun yang memperoleh Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	69.867.200,-	41.039.316,-	58,74
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio siswa per guru PAUD	315.815.500,-	254.045.000,-	80,44
	Rasio siswa per guru SD/MI			
	Rasio siswa per guru SMP/MTs			
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	315.815.500,-	254.045.000,-	80,44
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang memiliki ijin operasional (%)	42.600.000,-	42.000.000,-	98,59
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	42.600.000,-	42.000.000,-	98,59
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah siswa usia 7-18 tahun yang memperoleh Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	35.000.000,-	-	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Rasio Jumlah siswa usia 7-18 tahun yang menerima buku	35.000.000,-	-	0,00
	Rasio Jumlah siswa usia 7-18 per buku			

Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku)	35.000.000,-	0,-	0,-
--	--	--------------	-----	-----

Dari Anggaran Program Prioritas, terlihat bahwasanya sasaran strategis didukung oleh anggaran prioritas sebesar **Rp. 79.868.119.720,-** dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 73.941.818.469,-** sehingga serapan capaian menunjukkan angka **92,58%**.

Sementara selain anggaran prioritas, terdapat anggaran pendukung yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.29
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis
Program Pendukung Dinas Pendidikan
Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Target 2025		Capaian Keuangan (%)
		Target	Realisasi	
T2 Penguatan Tata Kelola, Integritas, Akuntabilitas dan Citra Masyarakat				
S2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan				
Indikator Sasaran Strategis PD	Nilai LKIP	215.301.569.391,-	203.633.626.062,-	94,58
	Persentase Rekomendasi LHP yang ditindaklanjuti			
	Nilai SKM			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	215.301.569.391,-	203.633.626.062,-	94,58
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	213.993.023.040,-	202.562.421.224,-	94,66
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	211.237.908.457,-	200.760.631.421,-	95,04
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	2.755.114.583,-	1.801.789.803,-	65,40
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	41.108.000,-	38.480.000,-	93,61
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Terlaksananya dokumen Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	41.108.000,-	38.480.000,-	93,61
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Perangkat Daerah	13.768.982,-	4.468.840,-	32,46

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya dokumen Pendataan Administrasi Kepegawaian	4.491.932,-	0,-	0,-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	2.491.800,-	2.468.840,-	99,08
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.785.250,-	2.000.000,-	29,48
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya dokumen administrasi umum PD	336.559.120,-	313.290.800,-	93,09
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	5.979.600,-	2.828.700,-	47,31
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.544.880,-	80.274.600,-	88,66
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	79.986.440	78.663.235,-	98,35
Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	13.500.000,-	13.500.000,-	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.500.000,-	14.976.400,-	63,73
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.048.200,-	123.047.865,-	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang terpelihara	304.402.550	302.675.000	99,43
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.272.000,-	73.250.000	94,80
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	302.338.249,-	219.098.388,-	72,47
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	1.000.000,-	25,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	298.338.249,-	218.098.388	73,10
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpelihara	537.500.000,-	422.616.810,-	78,63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.500.000,-	7.500.000,-	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	375.000.000,-	262.616.810,-	70,03
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	120.000.000,-	119.407.000,-	99,51
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/Rehabilitasi	35.000.000,-	33.093.000,-	94,55

Untuk Anggaran Program Pendukung, terlihat bahwasanya sasaran strategis didukung oleh anggaran prioritas sebesar **Rp. 215.301.569.391,00** dan dapat terealisasi sebesar **Rp. 203.633.626.062,00** sehingga serapan capaian menunjukkan angka **94,58%**.

Dari tabel diatas dapat kita lihat perbedaannya bahwasanya besaran untuk anggaran prioritas dan pendukung adalah berbeda dan lebih besar program

prioritas dari program pendukung, dan hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.30
Perbandingan anggaran

NO	Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Prioritas	79.868.119.720,-	73.941.818.469,-	92,58
2	Pendukung	215.301.569.391,-	203.633.626.062,-	94,58
Total Capaian Anggaran		295.632.971.811,-	277.912.528.847,-	94,01

Perbandingan anggaran dan rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Pendidikan yang bersumber dari dana APBD Kota Tarakan selama 5 tahun terakhir dapat disajikan dalam tabel 3.41 berikut ini :

Tabel 3.31
Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan
Pembangunan Dinas Pendidikan

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	2019	91,717,756,912.00	50,652,386,334.00	41,065,370,578.00	44.77
2	2020	124.346.929.555.00	83.538.617.068.00	40.808.312.487.00	67.18
3	2021	291.912.220.069,00	245.058.518.556,00	46.850.501.513,00	83,95
4	2022	297.835.602794,00	283.556.972.148,57	14.278.630.645,43	95,21
5	2023	331.831.673.888,00	321.939.085.025,00	9.892.588.863,00	97,02
6	2024	317.421.569.854,24	307.428.080.973,28	9.993.488.880,96	96,85
7	2025	295.632.971.811.00	277.912.528.847.00	17.663.582.512.00	94.01

Dan untuk Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang bersumber dari APBD, APBN, DAK Fisik maupun DAK Non Fisik Tahun 2025

Penghargaan yang diterima Dinas Pendidikan Tahun 2025

1. Juara 1 HGN KGTK Prov Kaltara, Pelopor Kombel Pengawas Sekolah
2. Juara 1 HGN KGTK Prov Kaltara, Pelopor Kombel Kepala Satpel
3. Juara 1 HGN KGTK Prov Kaltara, Transformatif TPS
4. Juara 1 HGN KGTK Prov Kaltara, Transformatif TAS
5. Juara 1 HGN KGTK Prov Kaltara, Transformatif Kepala SD
6. Juara 1 HGN KGTK Prov Kaltara, Transformatif Guru SMP
7. Juara 2 Nasional HGN (Hari Guru Nasional), TAS (TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH) Hari Guru Nasional 2025BAB IV

Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja	TARIF				Program	Rujukan	Kisaran Kegiatan	Indikator KPI	Target Kegiatan	Kestaraan Awal	Anggaran	KETERANGAN				KETERANGAN	
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4								TR 1	TR 2	TR 3	TR 4		
							Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu (PPM) untuk memastikan mutu layanan pendidikan yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama (IKU) Mutu Layanan Pendidikan	21 orang	21 orang	20.800.000							
							Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu (PPM) untuk memastikan mutu layanan pendidikan yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama (IKU) Mutu Layanan Pendidikan	100 orang	100 orang	41.000.000							
							Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu (PPM) untuk memastikan mutu layanan pendidikan yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama (IKU) Mutu Layanan Pendidikan	21 orang	21 orang	10.000.000							
							Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu (PPM) untuk memastikan mutu layanan pendidikan yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama (IKU) Mutu Layanan Pendidikan	100 orang	100 orang	41.000.000							
							Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu (PPM) untuk memastikan mutu layanan pendidikan yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama (IKU) Mutu Layanan Pendidikan	21 orang	21 orang	20.800.000							
							Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu (PPM) untuk memastikan mutu layanan pendidikan yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama (IKU) Mutu Layanan Pendidikan	100 orang	100 orang	41.000.000							
							Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu (PPM) untuk memastikan mutu layanan pendidikan yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama (IKU) Mutu Layanan Pendidikan	21 orang	21 orang	20.800.000							
							Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu (PPM) untuk memastikan mutu layanan pendidikan yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama (IKU) Mutu Layanan Pendidikan	100 orang	100 orang	41.000.000							
							Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu (PPM) untuk memastikan mutu layanan pendidikan yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama (IKU) Mutu Layanan Pendidikan	21 orang	21 orang	20.800.000							
							Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu (PPM) untuk memastikan mutu layanan pendidikan yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama (IKU) Mutu Layanan Pendidikan	100 orang	100 orang	41.000.000							

Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	TERTAMBAH				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja	Rencana Awal	KETERANGAN				
		2021	2022	2023	2024							2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	70,37				Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran	PKL	Kelembagaan Sekolah	Program peningkatan mutu kependidikan di bidang kependidikan	4 tahun	Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran meliputi kegiatan yang dilaksanakan melalui berbagai cara antara lain melalui peningkatan mutu kependidikan dan peningkatan mutu pembelajaran	10.000,00				
		0,26				Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran	PKL	Kelembagaan Sekolah	Program peningkatan mutu kependidikan di bidang kependidikan	1 tahun	Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran meliputi kegiatan yang dilaksanakan melalui berbagai cara antara lain melalui peningkatan mutu kependidikan dan peningkatan mutu pembelajaran	10.000,00				



 Tanggal: 17 Agustus 2023
 NRP: 09901212007611002
 NPM: 09901212007611002



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENDIDIKAN
 Jalan Jend. Sudirman Tarakan Telo. 60551. 05367
TARAKAN

RENCANA AKSI DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025

TRIWULAN II

Kronologi	Indikator Kinerja	TARUN				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Subsistem		Target Kegiatan	Batasan Waktu	Zones	WARTU PELAKSANAAN					
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4				TR 1	TR 2				TR 3	TR 4				
1	Aspek Perencanaan Pendidikan	1.1	1.2	1.3	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
2	Aspek Pelaksanaan Pendidikan	2.1	2.2	2.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
3	Aspek Penilaian Pendidikan	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
4	Aspek Pengembangan Pendidikan	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1

Kategori Kegiatan	TARIK				Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Berkas Abstrak	Anggaran	KETERANGAN					
	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4						TR 1	TR 2	TR 3	TR 4		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50															
51															
52															
53															
54															
55															
56															
57															
58															
59															
60															
61															
62															
63															
64															
65															
66															
67															
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															
76															
77															
78															
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															
86															
87															
88															
89															
90															
91															
92															
93															
94															
95															
96															
97															
98															
99															
100															

Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja	TARIF				Program	Egiatan	Sub Kegiatan	Sasaran dan Kegiatan		Target Kegiatan	Batasan Awal	ANGGARAN	PILAI PELAKSIAN			
		TW.1	TW.2	TW.3	TW.4				TW.1	TW.2				TW.3	TW.4	REVISI	
												10					
												2010/400					
												19.950.000					
												60.198.000					
												94.961.000					
												60.198.000					
												60.198.000					
												60.198.000					
												60.198.000					
												60.198.000					
												60.198.000					
												60.198.000					
												60.198.000					

Kategori Strategi	Indikator Kinerja	TAKSI				Program	Evaluasi	Sub Kegiatan	Indikator Esas		Target Kegiatan	Batasan Awal	Anggaran	KAPASITAS			
		TK.1	TK.2	TK.3	TK.4				TK.1	TK.2				TK.3	TK.4		
								Indikator Utama: Mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, khususnya dalam aspek...	Indikator Esas: Jumlah Guru yang Terampil	700 guru	Program kegiatan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan alat peraga digital dan media pembelajaran berbasis teknologi.	200.000.000					
								Indikator Utama: Meningkatkan kualitas layanan pembelajaran berbasis teknologi, khususnya dalam aspek...	Indikator Esas: Jumlah Guru yang Terampil	42 orang	Program kegiatan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan alat peraga digital dan media pembelajaran berbasis teknologi.	100.000.000					
								Indikator Utama: Meningkatkan kualitas layanan pembelajaran berbasis teknologi, khususnya dalam aspek...	Indikator Esas: Jumlah Guru yang Terampil	22 orang	Program kegiatan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan alat peraga digital dan media pembelajaran berbasis teknologi.	100.000.000					
								Indikator Utama: Meningkatkan kualitas layanan pembelajaran berbasis teknologi, khususnya dalam aspek...	Indikator Esas: Jumlah Guru yang Terampil	22 orang	Program kegiatan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan alat peraga digital dan media pembelajaran berbasis teknologi.	100.000.000					
								Indikator Utama: Meningkatkan kualitas layanan pembelajaran berbasis teknologi, khususnya dalam aspek...	Indikator Esas: Jumlah Guru yang Terampil	22 orang	Program kegiatan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan alat peraga digital dan media pembelajaran berbasis teknologi.	100.000.000					
								Indikator Utama: Meningkatkan kualitas layanan pembelajaran berbasis teknologi, khususnya dalam aspek...	Indikator Esas: Jumlah Guru yang Terampil	22 orang	Program kegiatan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan alat peraga digital dan media pembelajaran berbasis teknologi.	100.000.000					

Kategori	Subsistem Kinerja	TAMBAH				Program	Kejuruan	Bidang Kejuruan	Indikator Sub		Target Kejuruan	Rencana Awal	ANGGARAN	WILAYAH KERJA				KETERANGAN
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4				TR 1	TR 2				TR 3	TR 4			
1	Program Kerja MAN/Depdiknas	100%					Program Kejuruan MAN/Depdiknas	Kejuruan Bidang Pendidikan	Indikator Sub: Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	100%	100%	100.000.000						
	Indikator Kinerja Utama (IKU)	100%					Program Kejuruan MAN/Depdiknas	Kejuruan Bidang Pendidikan	Indikator Sub: Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	100%	100%	100.000.000						

Tanda Tangan
 NIK: 19601120011992
 NIP: 19601120011992

Kategori Strategis	Indikator Kinerja	TARIKAT				Program	Regulasi	Sub Kegiatan	Indikator Esis	Target Kegiatan	Keterangan Awal	AMOUNT	KALAI PERAKSIAN				TOTAL	
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4								TR 1	TR 2	TR 3	TR 4		
							Prosedur Pengukuran Penilaian dan Komparasi (TK) 2018 (Peningkatan)	0201/2018/TK/001/2018	0201/2018/TK/001/2018	22 orang	Pelaksanaan program TK untuk peningkatan dan pengurangan sistem penilaian untuk prosedur dan target kependidikan	20.000.000						
							Prosedur Pengukuran Penilaian dan Komparasi (TK) 2018 (Peningkatan)	0201/2018/TK/001/2018	0201/2018/TK/001/2018	100 orang	Berlaksanaan prosedur dalam pelaksanaan program TK untuk peningkatan dan pengurangan sistem penilaian untuk prosedur dan target kependidikan	20.000.000						
							Prosedur Pengukuran Penilaian dan Komparasi (TK) 2018 (Peningkatan)	0201/2018/TK/001/2018	0201/2018/TK/001/2018	100 orang	Berlaksanaan prosedur dalam pelaksanaan program TK untuk peningkatan dan pengurangan sistem penilaian untuk prosedur dan target kependidikan	20.000.000						
							Prosedur Pengukuran Penilaian dan Komparasi (TK) 2018 (Peningkatan)	0201/2018/TK/001/2018	0201/2018/TK/001/2018	100 orang	Berlaksanaan prosedur dalam pelaksanaan program TK untuk peningkatan dan pengurangan sistem penilaian untuk prosedur dan target kependidikan	20.000.000						
							Prosedur Pengukuran Penilaian dan Komparasi (TK) 2018 (Peningkatan)	0201/2018/TK/001/2018	0201/2018/TK/001/2018	100 orang	Berlaksanaan prosedur dalam pelaksanaan program TK untuk peningkatan dan pengurangan sistem penilaian untuk prosedur dan target kependidikan	20.000.000						
							Prosedur Pengukuran Penilaian dan Komparasi (TK) 2018 (Peningkatan)	0201/2018/TK/001/2018	0201/2018/TK/001/2018	100 orang	Berlaksanaan prosedur dalam pelaksanaan program TK untuk peningkatan dan pengurangan sistem penilaian untuk prosedur dan target kependidikan	20.000.000						
							Prosedur Pengukuran Penilaian dan Komparasi (TK) 2018 (Peningkatan)	0201/2018/TK/001/2018	0201/2018/TK/001/2018	100 orang	Berlaksanaan prosedur dalam pelaksanaan program TK untuk peningkatan dan pengurangan sistem penilaian untuk prosedur dan target kependidikan	20.000.000						
							Prosedur Pengukuran Penilaian dan Komparasi (TK) 2018 (Peningkatan)	0201/2018/TK/001/2018	0201/2018/TK/001/2018	100 orang	Berlaksanaan prosedur dalam pelaksanaan program TK untuk peningkatan dan pengurangan sistem penilaian untuk prosedur dan target kependidikan	20.000.000						

Kategori Strategis	Sub-kategori	INDUKSI				Program	Egiatan	Sub Kegiatan	Kategori Sub Kegiatan	Vektor Kegiatan	Beban Awal	APLIKASI	KATEGORISASI				MELAKUKAN
		TP 1	TP 2	TP 3	TP 4								TP 1	TP 2	TP 3	TP 4	
	Program Guru Pendidikan 81/104					Perencanaan Pendidikan (WDM)		Struktur dan Adanya rencana yang menyeluruh dan menyeluruh	Adanya program indikator dan indikator yang terdapat dalam rencana yang dilaksanakan yang dilaksanakan	Adanya	Perencanaan, evaluasi, implementasi, dan evaluasi yang dilaksanakan	28.835.000					
	Jodan Diberhad Guru PPG					Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan bagi Bidan, Perilaku, dan Pendidikan		Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan bagi Bidan, Perilaku, dan Pendidikan	Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan bagi Bidan, Perilaku, dan Pendidikan	150.000.000							



 Menteri, Jenderal 2025
 RI/15.1/2025
 Tj. M. M. M. M. M.
 NIP. 000000000000000000



RENCANA AKSI DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025

TRIMESTER IV

Klasifikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	TRIMESTER				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Target Kegiatan	Batasan Waktu	Anggaran	WALITU PERANGKAT					
		TR I	TR II	TR III	TR IV								TR I	TR II	TR III	TR IV		
01	01																	
02	02																	
03	03																	
04	04																	
05	05																	
06	06																	
07	07																	
08	08																	
09	09																	
10	10																	
11	11																	
12	12																	
13	13																	
14	14																	
15	15																	
16	16																	
17	17																	
18	18																	
19	19																	
20	20																	
21	21																	
22	22																	
23	23																	
24	24																	
25	25																	
26	26																	
27	27																	
28	28																	
29	29																	
30	30																	
31	31																	
32	32																	
33	33																	
34	34																	
35	35																	
36	36																	
37	37																	
38	38																	
39	39																	
40	40																	
41	41																	
42	42																	
43	43																	
44	44																	
45	45																	
46	46																	
47	47																	
48	48																	
49	49																	
50	50																	

Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja	TARIF				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator KPI	Target Kegiatan	Berkas Bukti	ANALISA	KASUS PENERAPAN			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1. Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan dan workshop	10 orang	10 orang	10 orang	20.000.000				
							Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1. Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan dan workshop	10 orang	10 orang	10 orang	20.000.000				
							Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1. Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan dan workshop	10 orang	10 orang	10 orang	20.000.000				
							Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1. Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan dan workshop	10 orang	10 orang	10 orang	20.000.000				
							Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1. Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan dan workshop	10 orang	10 orang	10 orang	20.000.000				

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	
		1	2	3	4								12	13
14													15	
	Program Guru PAUD dengan Kurikulum 2013				79,0	Prosedur Pelaksanaan	Prosedur Pelaksanaan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tingkat Kegiatan	Kemajuan Aktual	APORABAR		
	UJIB					Prosedur Pelaksanaan	Prosedur Pelaksanaan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Tingkat Kegiatan	Kemajuan Aktual	150.000.000		


 Tanggal: 2 Agustus 2025
 KIR: LA/1000
 NIP: 9699121297031022

TABEL 1.1
LAPORAN KONSOLIDASI PEMBIAYUAN ROTA TARAKAN
SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN

Dinas Pendidikan Kota Tarakan

1	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BIAYA MENURUT OPA (Rp.)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN (Rp.)	SISA DANA (Rp.)	PA/PPTK
			FBSK (%)	KEU. (%)			
2	3	4	5	6	7	8	9
I	Jumlah Alok. Realisasi FBSK & Keu. Kumulatif SKPD	296.832.712.811,00	89,44	84,21	277.212.828.947,00	17.619.883.864,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	216.381.889.391,00	89,35	84,58	201.633.626.062,00	11.667.943.328,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	215.981.623.040,00	100,00	94,96	209.543.421.224,00	11.438.201.816,00	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	211.237.908.457,00	100,00	95,24	200.700.631.421,00	10.477.277.036,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.746.114.583,00	100,00	66,40	1.801.709.803,00	953.374.780,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.04	Administrasi Pelaksanaan Daerah Kelembagaan Perangkat Daerah	41.108.860,00	100,00	83,81	34.488.000,00	2.428.360,00	
1.01.01.2.04.04	Pendaftaran dan Pendaftaran Data Kelembagaan Daerah	41.108.860,00	100,00	83,81	34.488.000,00	2.428.360,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.08	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.788.882,00	37,39	32,48	4.468.940,00	9.389.142,00	
1.01.01.2.08.03	Pendaftaran dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian	4.491.932,00	0,00	0,00	0,00	4.491.932,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.08.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.491.900,00	100,00	99,00	2.466.940,00	22.960,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.08.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.796.750,00	38,76	39,40	2.000.000,00	4.796.750,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.09	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	336.556.129,99	84,90	83,00	283.298.800,00	22.268.329,99	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Komposisi Insentif/Link/Peenangan Sampingan Kantor	5.879.000,00	61,00	47,31	2.828.700,00	3.050.300,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor	80.544.880,00	100,00	88,88	80.274.800,00	10.270.080,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.09.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.986.410,00	100,00	88,20	78.955.200,00	1.332.210,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.09.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Fasilitas Kurjangan Tinta	13.500.000,00	100,00	100,00	13.500.000,00	0,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.09.0008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya IT dan Listrik	23.800.000,00	69,53	63,73	14.978.400,00	8.322.600,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.09.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.048.200,00	100,00	100,00	123.047.895,00	335,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	77.272.000,00	100,00	94,80	73.256.900,00	4.022.900,00	
1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Mesukan Lainnya	77.272.000,00	100,00	94,80	73.256.900,00	4.022.900,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.338.248,00	72,47	72,47	219.098.388,00	83.239.860,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Sani Masyarakat	4.000.000,00	25,00	25,00	1.000.000,00	3.000.000,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya IT dan Listrik	298.338.248,00	73,12	73,12	218.098.388,00	80.239.860,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	537.500.000,00	89,78	78,53	421.616.816,00	114.883.184,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.500.000,00	100,00	100,00	7.500.000,00	0,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan, Perawatan Dinas Operasional atau Layanan	375.000.000,00	88,89	70,03	262.614.810,00	112.385.190,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan/Perbaikan/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000,00	100,00	80,51	119.407.000,00	593.000,00	Safarudin, SE
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Perbaikan/Gedung dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	100,00	84,98	33.093.000,00	1.907.000,00	Safarudin, SE
1.01.02.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	73.888.119.228,00	98,19	91,88	73.041.818.468,00	1.989.448.799,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	42.288.487.148,88	98,26	91,20	38.987.277.276,00	3.842.359.417,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mobil Sekolah	2.777.600.000,00	100,00	67,85	2.720.730.548,00	56.869.452,00	M. Taufiq Akbar, S. Pd
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Moral, Bahak dan Kreativitas Siswa	47.360.300,00	61,00	70,61	41.700.000,00	15.660.300,00	Seseng, S. Pd
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	20.480.000,00	100,00	88,44	20.072.360,00	413.620,00	Nurdiah, S. Pd, M. Si
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Manajemen dan Manajemen Sekolah	35.647.545,00	88,09	86,53	18.130.000,00	14.712.545,00	Seseng, S. Pd
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	19.451.880.980,00	95,86	87,94	18.226.163.935,00	216.697.045,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	252.000.000,00	100,00	100,00	252.000.000,00	0,00	Abdul Razaq, SE
1.01.02.2.03.0018	Pengadaan Dana ROP PAUD	8.773.891.800,00	100,00	86,42	8.840.528.238,00	135.306.362,00	Abdul Razaq, SE
1.01.02.2.03.0019	Pengadaan Kapasitas Pengajaran Dana ROP PAUD	8.348.000,00	100,00	86,96	7.223.190,00	1.121.810,00	Abdul Razaq, SE
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan kondisi dasar untuk pendidikan	31.807.400,00	76,47	75,77	15.262.390,00	8.315.520,00	Nurdiah, S. Pd, M. Si
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Roving Pendidikan	17.321.400,00	100,00	92,67	18.091.400,00	1.270.000,00	Nurdiah, S. Pd, M. Si
1.01.02.2.03.0026	Koordinasi, Pemantauan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	66.421.400,00	71,23	67,84	40.870.691,00	19.550.709,00	Abdul Razaq, SE
1.01.02.2.03.0028	Solusi dan Adyokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	38.291.300,00	100,00	62,54	16.777.340,00	1.514.310,00	Abdul Razaq, SE
1.01.02.2.03.0029	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	18.023.700,00	82,80	80,00	14.906.936,00	3.116.764,00	Nurdiah, S. Pd, M. Si
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	548.018.000,00	100,00	99,99	548.169.000,00	1.847.000,00	Wahyudi, ST
1.01.02.2.03.0037	Pembelian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perzudung, kekerasan, dan intoleransi	20.233.100,00	100,00	86,00	20.115.640,00	117.460,00	Abdul Razaq, SE
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan atau Magang/PIL, untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	25.000.000,00	60,43	60,43	15.129.000,00	9.871.000,00	Nurdiah, S. Pd, M. Si
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Peningkatan Peserta Didik	100.000.000,00	100,00	96,93	96.927.800,00	3.072.200,00	Abdul Razaq, SE
1.01.02.2.03.0045	Pengadaan Alat Peraga dan Peraga Peserta Didik PAUD	599.948.000,00	100,00	94,70	568.175.976,00	31.772.024,00	M. Taufiq Akbar, S. Pd
1.01.02.2.04	Perbaikan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan	3.651.696.876,00	98,91	98,00	3.630.191.800,00	79.235.846,00	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Nonformal/Kelembagaan	83.250.025,00	85,02	84,85	46.500.000,00	37.750.025,00	Burhan, SE
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kelembagaan	31.711.300,00	100,00	96,00	31.060.240,00	651.060,00	Burhan, SE
1.01.02.2.04.0017	Pengadaan Dana ROP Sekolah Nonformal/Kelembagaan	3.385.787.000,00	100,00	98,84	3.363.536.960,00	12.247.610,00	Burhan, SE
1.01.02.2.04.0019	Pengadaan Kapasitas Pengajaran Dana ROP Sekolah Nonformal/Kelembagaan	27.438.300,00	100,00	82,88	25.416.200,00	1.960.100,00	Burhan, SE
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penguasaan Taktis/tp, informasi dan komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	15.968.960,00	94,00	79,88	12.281.800,00	3.687.160,00	Burhan, SE
1.01.02.2.04.0025	Pengembangan literasi digital untuk pendidikan	18.551.450,00	91,78	79,40	13.141.800,00	5.409.650,00	Burhan, SE
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penguasaan Aplikasi Bidang Pendidikan	37.942.200,00	100,00	98,31	39.201.400,00	4.010.800,00	Burhan, SE
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Pemantauan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	40.100.000,00	100,00	94,00	40.084.500,00	1.515.500,00	Burhan, SE
1.01.02.2.04.0036	Pengembangan Peningkatan Peserta Didik	20.658.000,00	100,00	83,40	20.748.000,00	4.818.000,00	Burhan, SE
1.01.03.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	89.867.280,00	72,93	68,74	41.039.316,00	28.327.894,00	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	89.867.280,00	72,93	68,74	41.039.316,00	28.327.894,00	
1.01.03.2.01.0003	Penyusunan Status Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	89.867.280,00	72,93	68,74	41.039.316,00	28.327.894,00	Muhammad Tahir, ST, M. Pd
1.01.04.2	PROGRAM PENDUKU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	315.218.588,00	86,37	86,44	254.045.088,00	61.778.500,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	315.218.588,00	86,37	86,44	254.045.088,00	61.778.500,00	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Penilaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kelembagaan	315.218.588,00	86,37	86,44	254.045.088,00	61.778.500,00	Nurdiah, S. Pd, M. Si
1.01.05.2	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	43.986.003,00	99,09	98,08	43.669.969,00	600.000,00	
1.01.05.2.01	Pemertiban Izin Pendidikan Dasar yang Disertifikasikan oleh Pemerintah	43.986.003,00	100,00	98,99	43.669.969,00	600.000,00	
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Partisan Pendidikan Dasar yang Disertifikasikan oleh Pemerintah	43.986.003,00	100,00	98,99	43.669.969,00	600.000,00	Burhan, SE
1.01.06.2	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN BASTRA	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Bahasa dan Sastra	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	
1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pemeliharaan Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Muhammad Tahir, ST, M. Pd

1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	33.765.963.200,00	100,00	95,51	31.582.213.824,00	2.183.749.376,00	Deswari, S.Pd
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.000.500,00	58,01	54,51	2.300.000,00	1.700.500,00	Deswari, S.Pd
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10.094.800,00	100,00	97,08	9.710.000,00	384.800,00	Nordiah, S.Pd, MM
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	21.841.480,00	100,00	82,58	18.036.794,00	3.804.686,00	Nordiah, S.Pd, MM
1.01.02.2.01.0037	Relatifitas Penggunaan Aplikasi Belajar Pendidikan	5.000.000,00	100,00	100,00	5.000.000,00	0,00	Nordiah, S.Pd, MM
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	16.416.800,00	95,44	89,75	13.749.233,00	2.667.567,00	Nordiah, S.Pd, MM
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	8.867.000,00	0,00	0,00	0,00	8.867.000,00	Deswari, S.Pd
1.01.02.2.01.0041	Facilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.899.000,00	100,00	92,19	8.020.000,00	879.000,00	Nordiah, S.Pd, MM
1.01.02.2.01.0043	Pembinaan layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pemangahan pendampingan, kewirausahaan, dan inovasi	17.052.000,00	47,44	47,38	8.080.000,00	8.972.000,00	Deswari, S.Pd
1.01.02.2.01.0045	Peningkatan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	16.080.000,00	100,00	100,00	16.080.000,00	0,00	Deswari, S.Pd
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perangkat Lunak Peserta Didik	40.000.000,00	100,00	90,57	36.628.000,00	3.372.000,00	M. Taufiq Akbar, S.Pd
1.01.02.2.01.0047	Pengembangan Ruang Kelas Baru	1.108.000.000,00	100,00	99,71	1.102.820.900,00	5.179.100,00	M. Taufiq Akbar, S.Pd
1.01.02.2.01.0048	Rendahnya Bidang/Berat Sektora, Peningkatan dan Utilitas Sekolah	150.000.000,00	100,00	89,89	140.495.000,00	9.505.000,00	M. Taufiq Akbar, S.Pd
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknik, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	16.834.000,00	83,05	83,03	13.980.000,00	2.854.000,00	Nordiah, S.Pd, MM
1.01.02.2.01.0050	Perkembangan Proses Belajar bagi Peserta Didik	25.325.500,00	99,31	97,74	25.316.640,00	889,000,00	Deswari, S.Pd
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Bidang/Berat Ruang Kelas Sekolah	300.000.000,00	100,00	99,43	294.852.800,00	5.147.200,00	Wahyudi, ST
1.01.02.2.01.0054	Pengadaan Biaya Peserta Peserta Didik Sekolah Dasar	2.008.500.000,00	100,00	92,21	1.852.076.000,00	156.424.000,00	Deswari, S.Pd
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Fraksi dan Perangkat Peserta Didik	1.234.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000.000,00	M. Taufiq Akbar, S.Pd
1.01.02.2.00	Pengadaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.478.879.756,00	99,64	91,82	21.866.236.248,00	1.612.643.508,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Bidang/Berat Ruang Kelas Sekolah	730.000.000,00	100,00	99,81	727.196.000,00	2.804.000,00	Wahyudi, ST
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Mebel Sekolah	812.000.000,00	100,00	97,86	499.999.500,00	312.000.500,00	M. Taufiq Akbar, S.Pd
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perangkat Lunak Sekolah	67.381.000,00	100,00	81,73	75.484.200,00	8.103.200,00	M. Taufiq Akbar, S.Pd
1.01.02.2.02.0033	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.404.193.400,00	100,00	93,05	1.306.498.600,00	97.694.800,00	Muhammad Taha, S.T.M.Pd
1.01.02.2.02.0036	Pembinaan Mukt, Bakti dan Keresmas Siswa	246.397.300,00	98,00	98,44	170.036.300,00	76.361.000,00	Muhammad Taha, S.T.M.Pd
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Keri Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46.853.000,00	100,00	99,04	46.445.000,00	408.000,00	Nordiah, S.Pd, MM
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Ketersediaan dan Manajemen Sekolah	17.741.200,00	67,06	64,61	11.477.800,00	6.263.400,00	Muhammad Taha, S.T.M.Pd
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20.270.070.600,00	100,00	91,85	18.619.484.400,00	1.650.586.200,00	Muhammad Taha, S.T.M.Pd
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00	3.790.000,00	Muhammad Taha, S.T.M.Pd
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	18.844.800,00	100,00	97,85	18.187.210,00	657.590,00	Nordiah, S.Pd, MM
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	16.869.000,00	100,00	89,50	13.200.000,00	3.669.000,00	Muhammad Taha, S.T.M.Pd
1.01.02.2.02.0050	Facilitas Penggunaan Aplikasi Belajar Pendidikan	26.757.100,00	100,00	88,78	23.216.840,00	3.540.260,00	Nordiah, S.Pd, MM
1.01.02.2.02.0061	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15.781.100,00	43,46	37,81	7.066.080,00	8.715.020,00	Muhammad Taha, S.T.M.Pd
1.01.02.2.02.0062	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	8.230.000,00	100,00	0,00	0,00	8.230.000,00	Muhammad Taha, S.T.M.Pd
1.01.02.2.02.0064	Facilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.700.000,00	100,00	90,91	7.000.000,00	700.000,00	Nordiah, S.Pd, MM
1.01.02.2.02.0065	Pembinaan layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pemangahan pendampingan, kewirausahaan, dan inovasi	12.287.500,00	100,00	80,16	9.650.000,00	2.637.500,00	Muhammad Taha, S.T.M.Pd
1.01.02.2.02.0069	Perkembangan Proses Belajar bagi Peserta Didik	29.919.400,00	79,01	70,54	20.955.396,00	8.964.004,00	Muhammad Taha, S.T.M.Pd
1.01.02.2.02.0090	Bimbingan Teknik, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10.614.800,00	88,22	73,97	9.000.000,00	1.614.800,00	Nordiah, S.Pd, MM
1.01.02.2.02.0091	Peningkatan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Muhammad Taha, S.T.M.Pd

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program Pendukung	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
APS pendidikan Kesetaraan 7-18 Tahun	26,81	37,51	139	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3.521.890.625,00	3.464.663.990,00	98,37	24,59% (Efisien)
APS PAUD Usia 5-6 Tahun	69,04	78,37	113,51	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	9.485.269.000,00	9.325.490.869,00	98,31	24,54% (Efisien)
APS Pendidikan Dasar Usia 7-15 Tahun	97,99	98,00	100,01	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah	60.245.261.050,00	56.133.737.552,00	93,18	
Persentase Rata-Rata Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi	65,86	71,31	108	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah	583.817.600,00	409.008.554,00	70,05	
Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	69,13	76,90	111,12	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah, PAUD dan Kesetaraan	2.543.984.450,00	1.235.457.326,00	48,56	
Persentase Rata-Rata Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah	98.015.245,00	48.492.620,00	69,12	101,27

Indikator kinerja APS Pendidikan Kesetaraan Usia 7-18 Tahun mengukur proporsi penduduk usia 7 hingga 18 tahun yang mengikuti jalur pendidikan non-formal/kesetaraan terhadap total penduduk pada kelompok usia yang sama. Indikator ini menjadi sangat penting sebagai upaya pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi warga yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal, sehingga tidak ada satupun anak usia sekolah yang terputus dari akses pendidikan.

Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 26,81%, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai mencapai 37,51%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai 139,0%, yang berarti melebihi target yang telah diperjanjikan secara sangat signifikan. Keberhasilan ini mencerminkan keberhasilan program Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp3.521.890.625,00 dan terealisasi

sebesar Rp3.464.663.990,00 atau mencapai 98,37% dari total anggaran yang dialokasikan.

Tingginya capaian angka partisipasi sekolah kesetaraan ini tidak terlepas dari berbagai upaya intensif yang dilakukan, antara lain: perluasan jangkauan layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), peningkatan kualitas tenaga pendidik kesetaraan, pemberian bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) kesetaraan, serta sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesetaraan sebagai alternatif pendidikan yang setara nilainya dengan pendidikan formal. Tingkat efisiensi anggaran untuk indikator ini tercatat sebesar 24,59%, yang dikategorikan sebagai EFISIEN, mengingat dengan serapan anggaran yang tinggi (98,37%), capaian kinerja justru melampaui target secara sangat signifikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 5-6 Tahun merupakan indikator yang mengukur tingkat partisipasi anak usia 5 hingga 6 tahun dalam layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Partisipasi PAUD merupakan fondasi yang sangat krusial bagi pengembangan sumber daya manusia, karena pada rentang usia ini merupakan periode emas (golden age) perkembangan otak anak yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak secara holistik dan integratif.

Target yang ditetapkan pada Tahun 2024 untuk indikator APS PAUD Usia 5-6 Tahun adalah sebesar 69,04%, dan realisasi yang dicapai adalah sebesar 78,37%. Hal ini menghasilkan capaian kinerja sebesar 113,51%, yang berarti target berhasil terlampaui dengan sangat baik. Capaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Program Pengelolaan Pendidikan, yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp9.485.269.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp9.325.490.869,00 atau setara 98,31% dari total pagu anggaran.

Keberhasilan peningkatan APS PAUD ini merupakan buah dari berbagai kebijakan dan program yang konsisten dijalankan, di antaranya: pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana PAUD, pembinaan dan peningkatan kompetensi guru PAUD, pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, serta kampanye pentingnya PAUD kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Tingkat efisiensi anggaran pada program ini adalah sebesar 24,54%, dikategorikan sebagai EFISIEN, mengingat capaian kinerja yang melampaui target dengan realisasi anggaran yang tinggi dan tepat sasaran.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Usia 7-15 Tahun merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur keberhasilan pemenuhan hak atas pendidikan dasar bagi seluruh anak usia sekolah. Indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil memastikan seluruh anak usia 7 sampai dengan 15 tahun mendapatkan akses

dan layanan pendidikan dasar yang wajib ditempuh selama sembilan tahun sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Target yang telah ditetapkan untuk indikator ini pada Tahun 2024 adalah sebesar 97,99%, dan realisasi yang dicapai adalah sebesar 98,00%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100,01%, yang berarti target berhasil tercapai dan bahkan sedikit melampaui angka yang diperjanjikan. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Program Pengelolaan Pendidikan, dengan total anggaran Rp60.245.261.050,00 yang terealisasi sebesar Rp56.133.737.552,00 atau mencapai 93,18% dari total pagu.

Pencapaian APS Pendidikan Dasar yang hampir mencapai angka sempurna ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan, mulai dari kebijakan penghapusan biaya pendidikan, program beasiswa dan bantuan sosial bagi siswa kurang mampu, penyediaan sarana transportasi bagi siswa di daerah terpencil, hingga penguatan program pencegahan putus sekolah. Sisa 2% yang belum terlayani menjadi perhatian khusus untuk terus ditangani secara komprehensif pada tahun-tahun berikutnya melalui pendekatan yang lebih inovatif dan tepat sasaran.

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang mutlak harus dikuasai oleh setiap peserta didik sebagai bekal untuk menghadapi tantangan kehidupan di abad ke-21. Indikator persentase rata-rata capaian kemampuan literasi dan numerasi mengukur sejauh mana peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah menguasai kompetensi membaca, memahami teks, serta kemampuan berpikir matematis secara logis dan analitis.

Target capaian untuk indikator ini pada Tahun 2024 adalah sebesar 65,86%, dan realisasi yang berhasil diwujudkan adalah sebesar 71,31%, menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 108,0% atau melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini dihasilkan melalui sinergi antara Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, dan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra, yang keseluruhannya mendukung pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah. Anggaran yang dialokasikan untuk program-program tersebut adalah sebesar Rp583.817.600,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp409.008.554,00 atau setara 70,05% dari total pagu anggaran.

Meskipun realisasi anggaran tidak mencapai 100%, namun capaian kinerja justru melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Di antara program-program yang mendorong peningkatan literasi dan numerasi adalah: pelatihan guru dalam pendekatan pembelajaran

berbasis literasi dan numerasi, penyediaan buku dan bahan bacaan berkualitas di sekolah, pelaksanaan asesmen kompetensi minimum (AKM), serta program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang dilaksanakan secara masif dan terstruktur di seluruh satuan pendidikan.

Akreditasi satuan pendidikan merupakan pengakuan formal atas kelayakan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga akreditasi yang berwenang. Indikator proporsi jumlah satuan pendidikan terakreditasi minimal B mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan standar mutu penyelenggaraan pendidikan di seluruh jenjang dan jenis satuan pendidikan, mulai dari PAUD, Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah Pertama.

Target yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah sebesar 69,13% satuan pendidikan yang telah terakreditasi minimal B, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 76,90%, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 111,12% atau melampaui target. Program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dengan kegiatan yang mencakup Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah, PAUD dan Kesetaraan. Total anggaran yang dialokasikan adalah Rp2.543.984.450,00 dengan realisasi sebesar Rp1.235.457.326,00 atau hanya mencapai 48,56% dari total pagu yang tersedia.

Rendahnya realisasi anggaran (48,56%) yang diikuti dengan capaian kinerja yang melampaui target (111,12%) merupakan gambaran nyata dari efisiensi yang sangat tinggi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini antara lain disebabkan oleh: satuan pendidikan yang telah secara mandiri melakukan persiapan akreditasi sehingga pendampingan yang diperlukan lebih minimal, efektivitas program peningkatan mutu yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, serta optimalisasi mekanisme akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi pendidikan yang telah dilakukan secara konsisten selama beberapa tahun terakhir mulai membuahkan hasil yang nyata dan terukur.

Iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas di lingkungan satuan pendidikan merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya ekosistem pendidikan yang kondusif, menyenangkan, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Indikator ini mengukur seberapa jauh sekolah-sekolah telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang aman dari perundungan (bullying), bebas dari diskriminasi, menghargai keberagaman, serta memberikan akses yang setara bagi peserta didik berkebutuhan khusus (inklusif).

Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 69,12%, dan realisasi yang dicapai adalah sebesar 70,00%, sehingga

capaian kinerja mencapai 101,27% atau melampaui target yang diperjanjikan. Program yang mendukung pencapaian ini adalah Program Pengelolaan Pendidikan melalui kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.015.245,00 dan terealisasi sebesar Rp48.492.620,00 atau mencapai 49,47% dari pagu yang tersedia.

Meskipun realisasi anggaran relatif rendah pada angka 49,47%, namun capaian kinerja berhasil melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program pembudayaan nilai-nilai kebhinekaan, penguatan pendidikan karakter, serta sosialisasi pencegahan bullying dan kekerasan di sekolah yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dan efisien. Berbagai inisiatif seperti: pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, pelatihan guru tentang pendidikan inklusif, implementasi program sekolah aman, serta penguatan peran Bimbingan dan Konseling (BK) terbukti memberikan dampak positif yang nyata terhadap iklim sekolah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berikut disajikan rekapitulasi capaian kinerja secara keseluruhan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh indikator kinerja sasaran pada Tahun 2024 berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan dan mencerminkan komitmen serta kerja keras seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran yang dialokasikan pada beberapa program utama. Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan yang bervariasi, namun secara keseluruhan mencerminkan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran pada Tahun 2024 telah menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan inti seperti Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini mencapai lebih dari 98%, yang mengindikasikan tingginya komitmen pelaksanaan program di lapangan. Adapun untuk kegiatan akreditasi satuan pendidikan dan iklim sekolah, rendahnya realisasi anggaran justru diiringi oleh capaian kinerja yang melampaui target, sehingga hal ini dikategorikan sebagai efisiensi anggaran yang tinggi.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang dicatatkan pada program Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan sebesar 24,59% dan program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 24,54% menunjukkan bahwa capaian kinerja yang melampaui target berhasil diwujudkan dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat optimal. Kondisi ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel sebagaimana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik

KESIMPULAN

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional dan daerah, serta menjadi instrumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Tahun 2025 memiliki arti strategis karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Tarakan periode 2025–2029 yang diturunkan dari RPJMD Kota Tarakan. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun ini menjadi fondasi awal sekaligus tolok ukur efektivitas perencanaan jangka menengah yang telah dirumuskan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, secara umum kinerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan menunjukkan capaian yang sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sebesar 99,02% berada dalam kategori **Sangat Tinggi**, yang mencerminkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan program, serta mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja.

Pada aspek aksesibilitas pendidikan, indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan capaian yang melampaui target tahunan dan bahkan telah memenuhi target akhir RPJMD lebih awal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Kota Tarakan mampu memberikan peluang pendidikan yang relatif baik bagi masyarakat, serta didukung oleh partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.

Pada aspek kualitas layanan pendidikan, mayoritas indikator seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta beberapa indikator akreditasi satuan pendidikan menunjukkan capaian yang tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal, terutama pada peningkatan kualitas akreditasi PAUD dan SD/MI, persentase pendidik berkualifikasi S1/D-IV, serta capaian literasi dan numerasi berdasarkan Asesmen Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan relatif terjaga, peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas sumber daya manusia pendidikan masih menjadi agenda prioritas.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, capaian Nilai SAKIP, tindak lanjut LHP, serta Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan tren positif. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan manajemen internal, sistem pelaporan kinerja, dan budaya kerja berbasis akuntabilitas telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Realisasi anggaran sebesar Rp277.912.528.847,00 dari total pagu Rp295.632.971.811 menunjukkan tingkat penyerapan yang baik dan mencerminkan komitmen terhadap prinsip efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran. Keterkaitan antara belanja program dan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa pengalokasian sumber daya telah relatif selaras dengan prioritas pembangunan pendidikan.

Walaupun demikian, tantangan struktural masih dihadapi, antara lain kebutuhan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, pemerataan kualitas tenaga pendidik, penguatan iklim sekolah yang aman dan inklusif, serta peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik. Tantangan tersebut menjadi perhatian penting dalam penyempurnaan strategi implementasi RENSTRA pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian, pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025 secara umum dapat dinilai berhasil dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target pembangunan pendidikan jangka menengah. Namun, upaya perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan agar kualitas pendidikan tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Tarakan.

Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, serta dalam rangka memastikan keberlanjutan pencapaian sasaran RENSTRA 2025–2029, maka dirumuskan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja
Perlu dilakukan penguatan integrasi antara dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA), penganggaran, dan pelaporan kinerja agar semakin berbasis outcome dan dampak. Setiap program dan kegiatan harus memiliki korelasi langsung dengan indikator kinerja yang terukur serta disertai analisis kebutuhan yang berbasis data aktual.
2. Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Transformasi Pendidikan
Upaya peningkatan literasi dan numerasi perlu diperkuat melalui:
 - Pengembangan kapasitas guru dalam pembelajaran berdiferensiasi;
 - Optimalisasi komunitas belajar dan supervisi akademik;
 - Pemanfaatan Raport Pendidikan sebagai dasar intervensi satuan pendidikan;
 - Fokus ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan akses pendidikan diikuti dengan peningkatan kualitas hasil belajar.

3. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Diperlukan strategi berkelanjutan untuk:

- Meningkatkan persentase pendidik berkualifikasi S1/D-IV;
- Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan riil sekolah;
- Memperkuat sistem pembinaan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik.

4. Penguatan Infrastruktur dan Tata Kelola Aset Pendidikan

Rehabilitasi gedung sekolah yang belum permanen, penyelesaian status lahan bermasalah, serta pengadaan sarana pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan harus menjadi prioritas dalam penganggaran tahun berikutnya.

5. Pengembangan Iklim Sekolah yang Aman, Inklusif, dan Berkarakter

Perlu penguatan kebijakan dan program untuk:

- Pencegahan perundungan dan kekerasan di satuan pendidikan;
- Peningkatan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- Penguatan nilai kebinekaan, toleransi, dan karakter kebangsaan.

6. Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Inovasi Layanan

Monitoring dan evaluasi kinerja harus dilakukan secara periodik dan sistematis, dengan mendorong inovasi layanan pendidikan

Sebagai penutup, Dinas Pendidikan Kota Tarakan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan capaian tahun 2025 bukanlah akhir dari proses, melainkan titik awal untuk memperkuat langkah menuju pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, merata, dan berkelanjutan